



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks. (031) 8941145
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/5704/438.1.3.4/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

KEDUA : Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP 19700926 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks. (031) 8941145
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/ 8 /438.1.3.4/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;

b. bahwa dalam rangka Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, maka perlu membentuk Tim Penyusun dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 90);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor: 050/63/438.6.1/2023 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
- b. mengolah data dan informasi untuk bahan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;

- c. menyempurnakan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sesuai hasil revidi Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH



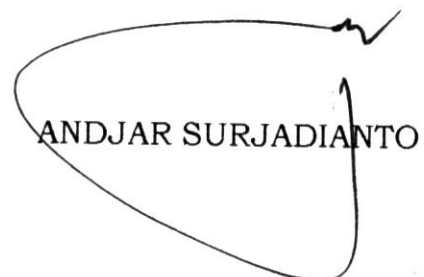
ANDJAR SURJADIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR :188/ 8 /438.1.3.4/2023
TANGGAL : 5 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 – 2026

No.	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	Ketua	Pj. Sekretaris Daerah
2	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum
3	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		b. Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		c. Kepala Bagian Pemerintahan
		d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
		e. Kepala Bagian Hukum
		f. Kepala Bagian Kerja Sama
		g. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		h. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
		i. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		j. Kepala Bagian Umum
		k. Kepala Bagian Organisasi
		l. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		m. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
		n. Perencana Ahli Muda
		o. Pengelola Bahan Perencanaan

Pj. SEKRETARIS DAERAH


ANDJAR SURJADIANTO

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENSTRA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyusunan rancangan akhir perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan dokumen yang memuat Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo secara spesifik merupakan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan arah kebijakan yang dijelaskan dalam Renstra ini, maka diperlukan strategi yang dituangkan dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan dalam kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung keberhasilan program. Melalui dokumen perubahan Renstra ini, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat memperoleh pedoman dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ingin dicapai selama periode Tahun 2021-2026.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian rancangan akhir perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.

Sidoarjo, Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP 19700926 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR GAMBARv

BAB I PENDAHULUAN1

1.1Latar Belakang.....1

1.2Landasan Hukum.....4

1.3Maksud dan Tujuan5

1.4Sistematika Penulisan6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH9

2.1Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....9

2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo9

2.1.2 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo....14

2.2Sumber Daya Perangkat Daerah15

2.3Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah17

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidoarjo17

2.4Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah26

2.5 Kerja Sama Daerah.....30

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH31

3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi31

3.2Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih32

3.3Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi.....34

3.4Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis.....37

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis37

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH42

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah42

4.1.1 Tujuan42

4.1.2 Sasaran43

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN45

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN53

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN272

BAB VIII PENUTUP273

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Uraian SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 ...15

Tabel 2.2 Aset yang Dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.....16

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo18

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.....22

Tabel 3.1 Pemetaan permasalahan pokok, masalah, dan akar masalah31

Tabel 3.2 Telaah Kementerian Sekretaris Negara35

Tabel 3.3 Analisis Lingkungan Internal.....38

Tabel 3.4 Analisis Lingkungan Eksternal38

Tabel 3.5 Pemetaan Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal.....40

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.....43

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.....45

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.....54

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 272

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan di Daerah2

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidoarjo14

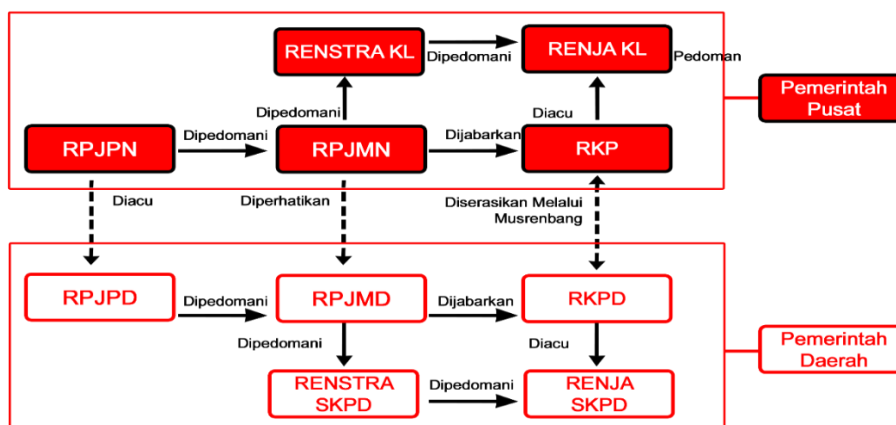
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan akhir perubahan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan Strategis juga merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang wajib disusun/ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Permasalahan yang muncul merupakan konsekuensi dari proses pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh kepala daerah. Pada unit kerja atau Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan daerah 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan mandate dari RPJMD daerah yang terpilih. Gambar di bawah merupakan hubungan antar dokumen perencanaan di daerah.



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan di Daerah

Melalui perencanaan strategis yang baik, instansi pemerintah lebih dapat mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan perubahan Renstra Tahun 2021-2026 sudah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terdapat fungsi dari Rencana Strategis (Renstra) yang ditujukan untuk pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah yaitu terdiri dari 5 (lima) tujuang fungsi pokok :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu, dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
5. Menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka diperlukan perubahan renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan perubahan Renstra mencakup sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan perubahan renstra;
2. Penyusunan rancangan perubahan renstra;
3. Perumusan rancangan akhir perubahan renstra; dan
4. Penetapan rancangan akhir perubahan renstra.

Setelah tahapan persiapan penyusunan perubahan renstra, dilanjutkan penyusunan rancangan perubahan renstra, kemudian dilanjutkan dengan perumusan rancangan akhir perubahan renstra dan selanjutnya ditetapkan sebagai rancangan akhir perubahan renstra

Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan

menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 ini menggunakan landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- n. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
- o. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 ini adalah

- a. Sebagai pedoman dalam menentukan arah tujuan organisasi sesuai dengan sasaran yang diprioritaskan melalui kebijakan, program dan kegiatan pokok sehingga seluruh komponen yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam organisasi dapat memahami secara utuh arah dan tujuan yang ingin dicapai.
- b. sebagai kendali dalam menentukan kebijakan dan program prioritas sehingga pelaksanaan penyelenggara tugas-tugas dapat berjalan secara baik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin konsistensi pembangunan Sekretariat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya;
- b. Menjamin komitmen seluruh pelaksana untuk berperan sesuai dengan kewenangan;
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Sekretariat Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan Kabupaten Sidoarjo; dan
- d. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif, mulai dari penyusunan, implementasi dan pertanggungjawaban.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 tersusun sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterkaitan Rencana Kerja, RKT dengan Renstra.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - 2.1.2 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - 4.1.1 Tujuan
 - 4.1.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan memuat visi dan misi RPJMD periode berkenaan, tujuan dan sasaran, serta rumusan mengenai pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan sebagai salah satu unsur pembantu Bupati Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

A. Tugas

Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

- B. Sekretariat Daerah di samping bertugas membantu Bupati dalam dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif juga mempunyai fungsi.

Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo antara lain:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.
2. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
 - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama yang terdiri dari: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; RSUD; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (pada urusan bidang kepemudaan dan olahraga); Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Kecamatan; dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama;
 - Pelaksanaan verifikasi rumusan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama;
 - Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama;

- Pengoordinasian hasil evaluasi terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama;
- Pelaporan evaluasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, serta Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air; Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (pada urusan bidang Pariwisata); Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Dinas Pangan dan Pertanian; Dinas Perikanan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; BUMD; dan BLUD;

- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pelaksanaan verifikasi rumusan kebijakan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengoordinasian hasil evaluasi terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pelaporan evaluasi di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan serta Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Asisten Administrasi Umum

1. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Perencanaan dan Keuangan.

2. Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

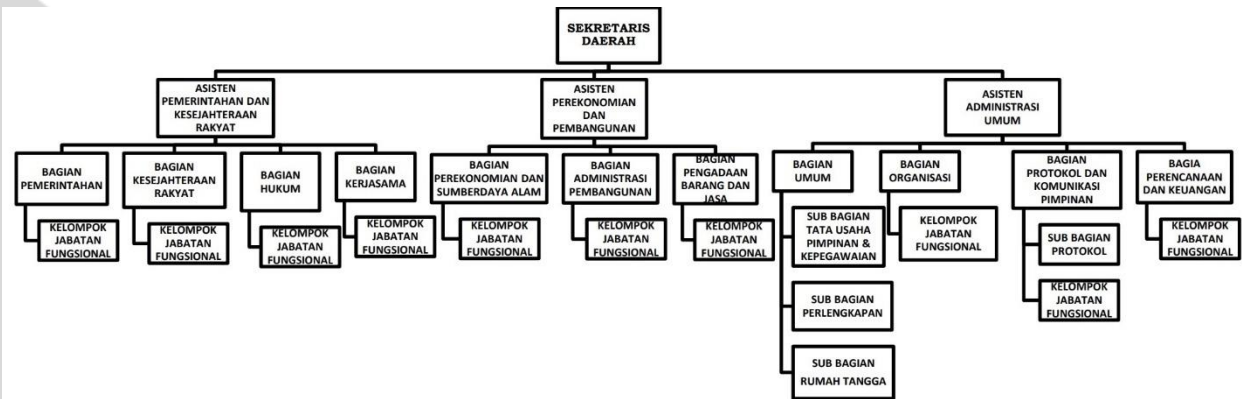
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan yang terdiri dari: Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah; Badan Pelayanan Pajak Daerah;
- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- Pelaksanaan verifikasi rumusan kebijakan daerah di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- Pengoordinasian hasil evaluasi terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- Pelaporan evaluasi di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perencanaan dan keuangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan

serta perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2022, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dibagi dalam susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bagian Hukum, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bagian Kerjasama, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - 1. Bagian Umum, terdiri dari:
 - Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - Sub Bagian Perlengkapan;
 - 2. Bagian Organisasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Protokol; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Ditinjau dari jenis kelamin, rentang usia, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjenjangan aparatur serta pangkat/golongan ruang, maka kondisi aparatur dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Uraian SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Berdasarkan Jenis Kelamin	155 orang
	- Laki-Laki	92 orang
	- Perempuan	63 orang
2.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	155 orang
	- S3	-
	- S2	25 orang
	- S1/D-IV	74 orang
	- D-III	17 orang
	- D-II	-
	- D-I	-
	- SLTA	37 orang
	- SLTP	2 orang
	- SD	-
4.	Berdasarkan Diklat PIM	20 orang
	- Pendidikan Pimpinan IV	4 orang
	- Pendidikan Pimpinan III	11 orang
	- Pendidikan Pimpinan II	5 orang
5.	Berdasarkan Eselon	36 orang
	- Eselon IV	20 orang
	- Eselon III	11 orang
	- Eselon II	5 orang
6.	Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	155 orang
	- IV/d	1 orang
	- IV/c	4 orang
	- IV/b	6 orang
	- IV/a	10 orang
	- III/d	16 orang
	- III/c	17 orang

	- III/b	29 orang
	- III/a	26 orang
	- II/d	24 orang
	- II/c	17 orang
	- II/b	2 orang
	- II/a	-
	- I/d	1 orang
	- I/c	2 orang
	- I/b	-
	- I/a	-

Sumber Data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2022

Data Sumber Daya Manusia yang dihimpun dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo per Bulan Desember Tahun 2022, dengan total SDM ASN sebanyak 155 orang. Selain ketersediaan SDM yang cukup, untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah diupayakan pengadaan prasarana dan sarana dengan aset yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 2.2 Aset yang Dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

No	JENIS KIB	JUMLAH ASET (Rp)	KETERANGAN
1	KIB A (Tanah)	81.061.169.615	Meliputi pendopo, kantor setda, villa tretes, rumah tamu, rumah dinas
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	45.387.874.175	Meliputi alat besar, alat angkut, alat bengkel dan ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran dan kesehatan, komputer

3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	36.860.138.848	Meliputi gedung kantor Setda, pendopo, rumah tamu, rumah dinas, jalur difabel, villa treset, pilar batas desa / kecamatan / daerah, tugu peringatan
4	KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	1.169.381.030	Meliputi jaringan instalasi air, listrik, telepon, pabx
5	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	208.813.850	Meliputi bahan perpustakaan (buku PUU), bahan bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga
TOTAL		164.687.377.518	

Sumber Data: Data KIB Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Data aset dihimpun dari data KIB A sampai KIB E Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo per Bulan Desember Tahun 2022, dengan total keseluruhan mencapai Rp 164.687.377.518 . Untuk kondisi sarana dan prasarana secara umum dalam kondisi masih layak pakai, kecuali untuk Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo diperlukan pelaksanaan rehabilitasi total dikarenakan kondisi bangunan gedung yang sudah tua.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai LPPD	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A	Sangat Tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Nilai Sakip	A			A	N/A	N/A	N/A	N/A	B	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase policy brief yang digunakan dalam perumusan kebijakan bupati	100%			100%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Nilai SKM	95			95	N/A	N/A	N/A	N/A	78,2	N/A	N/A	N/A	N/A	85,32%	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase Kesepakatan bersama kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama	100%			100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Indeks Pemerintahan yang baik	100%			90%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Persentase policy brief yang digunakan dalam perumusan kebijakan daerah	100%			N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
8	Persentase produk hukum daerah yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan	100%			N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

9	Persentase capaian indikator kinerja daerah yang memenuhi target	100%			N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
10	Nilai PMPRB	75			N/A	75	N/A	N/A	N/A	N/A	62, 93	N/A	N/A	N/A	N/A	83,91%	N/A	N/A	N/A
11	Rata- rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo	78,5			N/A	78,5	N/A	N/A	N/A	N/A	79,49	N/A	N/A	N/A	N/A	101,16%	N/A	N/A	N/A
12	Persentase implementasi produk hukum daerah	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
13	Persentase Implementasi Kebijakan daerah untuk:																		
	a. Bidang Pemerintahan	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	b. Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	c. Bidang Perekonomian	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	d. Bidang Pembangunan	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	e. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	f. Bidang Organisasi	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
14	Persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang mencapai target	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	63,33%	78,79%	63,64%	N/A	N/A	63,33%	78,79%	63,64%

15	Persentase OPD Pelayanan Publik dengan Nilai SKM minimal berkategori Baik	100%			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
16	Nilai SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	75			N/A	N/A	75	75	75	N/A	N/A	84	86,28	86,98	N/A	N/A	112%	115,04%	115,97%
17	Nilai SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah	75			N/A	N/A	75	75	75	N/A	N/A	87,5	85	85	N/A	N/A	116,67%	113,33%	113,33%

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 mengalami perubahan indikator sasaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018 dikarenakan adanya penyesuaian dengan perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 serta peningkatan akuntabilitas kinerja sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Indikator awal Renstra pada tahun 2016 adalah sebagai berikut

1. Nilai LPPD
2. Nilai Sakip
3. Persentase *policy brief* yang digunakan dalam perumusan kebijakan bupati
4. Nilai SKM
5. Persentase Kesepakatan bersama kerjasama yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama
6. Indeks Pemerintahan yang baik

Kemudian pada tahun 2017 karena adanya penyesuaian dengan perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, maka indikator kinerja Sekretariat daerah juga mengalami perubahan, menjadi :

1. Persentase *policy brief* yang digunakan dalam perumusan kebijakan daerah
2. Persentase produk hukum daerah yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Persentase capaian indikator kinerja daerah yang memenuhi target
4. Nilai PMPRB
5. Rata- rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo

Untuk peningkatan akuntabilitas kinerja sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, maka pada tahun 2018 indikator kinerja Sekretariat Daerah mengalami perubahan kembali menjadi :

1. Persentase implementasi produk hukum daerah
2. Persentase implementasi kebijakan daerah;
 - a. Bidang Pembangunan
 - b. Bidang Perekonomian
 - c. Bidang Kesra

- d. Bidang PBJ
 - e. Bidang Organisasi
 - f. Bidang Pemerintahan
3. Persentase IKU OPD yang mencapai target
 4. Persentase OPD Pelayanan dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik
 5. Nilai SKM Pelayanan Sekretariat Daerah
 6. Nilai SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah

Indikator yang terakhir tersebut digunakan mulai Tahun 2018 sampai dengan berakhirnya masa Renstra yaitu Tahun 2021.

Sebagian besar kinerja pelayanan telah mencapai dari target yang ditetapkan. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah komitmen dari semua *stakeholder* Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo serta evaluasi internal yang dilakukan secara berkala untuk memastikan target kinerja dapat tercapai.

Sedangkan kinerja pelayanan yang belum memenuhi target adalah Persentase IKU OPD yang mencapai target, dimana faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian target, yaitu :

- Masih belum optimalnya fungsi koordinasi dalam pemantauan progres kinerja PD;
- Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target IKU PD masih belum sepenuhnya dicarikan solusinya.

Tabel di bawah ini menunjukkan anggaran dan realisasi selama periode 5 (lima) tahun 2016-2021, rasio antara realisasi dan anggaran serta rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi :

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo																	
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	2017 (13)	2018 (14)	2019 (15)	2020 (16)	(17)	(18)
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo pada:																	
a. Bagian Hukum	2.218.115.000	1.500.000.000	1.526.466.900	2.013.643.010	1.126.938.660	1.970.374.724	1.307.820.930	1.194.969.568	1.732.578.109	883.322.550	88,83%	87,19%	78,28%	86,04%	78,38%	1.677.032.714	1.417.813.176
b. Bagian Pemerintahan	2.366.416.900	1.403.138.075	4.972.396.079	4.840.447.000	1.972.143.386	2.071.496.540	1.120.187.271	3.114.780.944	2.559.742.033	1.825.756.271	87,54%	79,83%	62,64%	52,88%	92,58%	3.110.908.288	2.138.392.612

c. Bagian Kerjasama	2.670.490.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.623.190.118	N/A	N/A	N/A	N/A	98,2 3%	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	2.670.490.000	2.623.190.118
d. Bagian Kesejahteraan Rakyat	4.158.538.643	3.571.516.100	6.968.216.569	8.858.253.248	9.776.601.570	3.788.315.560	3.447.172.090	6.484.012.394	8.402.540.031	7.934.210.359	91,1 0%	96, 52 %	93, 05 %	94, 86 %	81, 16 %	6.666.625.226	6.011.250.087
e. Bagian Perekonomia n	2.024.549.800	1.452.500.000	1.109.545.000	1.351.895.480	866.647.090	1.550.561.041	1.090.160.393	960.943.275	1.164.298.589	701.798.857	76,5 9%	75, 05 %	86, 61 %	86, 12 %	80, 98 %	1.361.027.474	1.093.552.431
f. Bagian Pembanguna n	2.083.765.000	1.635.675.000	1.317.955.837	1.348.907.570	1.268.766.145	1.867.085.107	1.513.894.715	1.290.587.565	1.295.782.103	1.248.906.996	89,6 0%	92, 55 %	97, 92 %	96, 06 %	98, 43 %	1.531.013.910	1.443.251.297
g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	1.715.275.600	3.829.628.797	4.637.505.785	2.575.185.304	N/A	1.519.181.557	3.092.893.140	3.836.286.614	2.129.806.091	N/A	88, 57 %	80, 76 %	82, 72 %	82, 70 %	3.189.398.872	2.644.541.851

h. Bagian Telematika	5.021.702.140	N/A	N/A	N/A	N/A	4.882.394.260	N/A	N/A	N/A	N/A	97,23%	N/A	N/A	N/A	N/A	5.021.702.140	4.882.394.260
i. Bagian Organisasi	1.612.000.000	2.446.425.000	1.111.650.000	1.985.078.280	776.852.080	1.365.150.174	2.146.678.851	1.024.898.669	1.684.298.828	689.612.501	84,69%	87,75%	92,20%	84,85%	88,77%	1.586.401.072	1.382.127.805
j. Bagian Umum	15.695.841.978	20.039.952.775	13.308.650.065	15.013.304.237	12.645.660.184	14.617.446.095	15.605.084.990	10.275.262.889	12.642.165.798	9.928.751.611	93,13%	77,87%	77,21%	84,21%	78,52%	15.340.681.848	12.613.742.277
k. Bagian Protokol dan Rumah Tangga	4.100.590.000	2.488.116.000	9.287.883.972	12.754.708.490	10.532.813.880	3.903.046.619	2.375.614.892	8.176.771.208	11.125.834.229	8.100.124.776	95,18%	95,48%	88,04%	87,23%	76,90%	7.832.822.468	6.736.278.345

Realisasi anggaran yang terbesar ada pada tahun 2016 yaitu 92,10% sedangkan yang terendah pada tahun 2020 sebesar 80,50%. Hal ini menunjukkan dari tahun ke tahun realisasi anggaran semakin menurun dan SILPA semakin tinggi.

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pendanaan pelayanan adalah prosedur/ mekanisme pelaksanaan yang kurang efektif. Dalam hal ini telah dilakukan tindak lanjut dengan upaya-upaya peningkatan pelayanan di semua bagian.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap renstra di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dimana dalam konsep *New Public Management (NPM)*, birokrasi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat yang idealnya dituntut untuk lebih mengedepankan aspek hasil (result) dibandingkan dengan sekedar control terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ada. Dari hasil telaahan terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat dan hasil analisis terhadap pembelanjaan anggaran dapat berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun. Peluang dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, peluang dan tantangan yang dijelaskan sebagai berikut :

- Hasil analisis terhadap Renstra Setda Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil analisa terhadap Renstra Setda Propinsi Jawa Timur bahwa dalam percepatan terwujudnya kinerja pelayanan sekretariat daerah, maka terdapat hal – hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan strategis sekretariat daerah untuk lima tahun kedepan, yaitu antara lain :

7. Evaluasi peningkatan pelayanan administrasi yang berkualitas melalui kebijakan di bidang mental kerohanian, pendidikan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, tenaga kerja,

- transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. Menciptakan kebijakan perekonomian yang kondusif bagi percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, utama sektor informal dan usaha mikro;
 9. Penguatan sinergi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
 10. Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat;
 11. Evaluasi tidak hanya pada realisasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan, namun juga mengevaluasi APBD secara keseluruhan, seperti dana transfer, hibah bansos, dan bantuan keuangan khusus;
 12. Peningkatan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa yaitu membuat proses pengadaan barang dan jasa dapat sepenuhnya dilakukan secara digital;
 13. Belum maksimalnya sistem akuntabilitas kinerja bagi aparatur;
 14. Kapasitas SDM dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan Profesionalitas;
 15. Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
 16. Masih belum mandiri SDM; dan
 17. Peningkatan pelayanan administrasi yang berkualitas melalui kebijakan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi kewilayahan dan Kerjasama.

Melihat hal tersebut di atas bisa, tantangan dan peluang yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, antara lain :

1. Penggalian atau analisa pada potensi perumusan kebijakan pada pengelolaan fasilitas di bidang mental kerohanian / spiritual , pendidikan, kepemudaan , pelayanan sosial dan kesehatan dimana tentunya diperlukan dukungan dana;
2. Mengembangkan nilai tambah (*added value*) komoditas unggulan lokal yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan;
3. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk halal lokal berbasis on line yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen;
4. Mendorong kemudahan investasi baru, berkembangnya ekonomi digital melalui start up bisnis dan industri kreatif;
5. Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi tumbuhkembangnya ekonomi lokal dan Usaha Mikro;
6. Pengembangan pertanian berbasis teknologi dan penguatan sistem ketahanan pangan daerah;
7. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada lima tahun mendatang untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan APBD yang tentunya membutuhkan tambahan alokasi sumber daya;
8. Memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada penyedia/pengusaha untuk dapat menayangkan produk di katalog elektronik dan toko daring. Sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya penyedia/pengusaha yang masuk ke dalam katalog elektronik dan toko daring, maka dapat mendorong PD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik dan toko daring;
9. Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja;
10. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai; dan
11. Penggalian atau Analisa pada potensi perumusan kebijakan pada pengelolaan fasilitas di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum dan kerja sama.

- Hasil telaahan terhadap RTRW

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029, maka dengan percepatan pelaksanaan pembangunan akan mempercepat pula rencana pengembangan wilayah berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam lima tahu mendatang peluang program strategis yang akan diupayakan untuk dapat terwujud adalah pembangunan *Frontage Road* dan RSUD Wilayah Sidoarjo Barat. Termasuk pada percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada proyek-proyek strategis, serta pemanfaatan lahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

- Hasil analisis terhadap KLHS

Sebagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdapat pada dokumen KLHS Kabupaten Sidoarjo, bahwa indikator keberhasilannya ditekankan untuk memanfaatkan alokasi anggaran yang ada untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini menjadi tantangan dan peluang untuk mengupayakan agar alokasi anggaran yang ditetapkan dalam anggaran kas terealisasi tepat waktu, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, yang merupakan kinerja pelayanan dari Sekretariat Daerah sebagai koordinator Perangkat Daerah.

2.5 Kerjasama Daerah

Kerjasama yang dilaksanakan Sekretariat Daerah terdiri dari:

1. Bentuk kerjasama : PKS, mitra Sekretariat Daerah dan PT BPR Delta Artha dengan judul Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Nomor: 500/6760/438.1.2.2/2021 dan KP/015/PKS/VIII/2021) dalam jangka waktu 27 Agustus 2021 s.d. Desember 2021 pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
2. Bentuk kerjasama : PKS, mitra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Sekretariat Daerah Kota Batu dengan judul Penggunaan Aplikasi e-Kenda dan Aplikasi e-SSH dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Pemerintah Kota Batu (Nomor: 134.4/06/PKS/422.011/2022 dan 415/12141/438.1.1.4/2022) dalam jangka waktu 06 September 2022 s.d. 06 September 2027 pada Bagian Administrasi Pembangunan.

Bab III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.1

Pemetaan permasalahan pokok, masalah, dan akar masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Kebijakan daerah yang disusun masih belum berkualitas	<ul style="list-style-type: none">• Belum terdapat pemecahan penyelesaian kebijakan• Belum secara optimal melibatkan fungsi sekretariat daerah dalam menyusun kebijakan	Belum memiliki pengawalan terhadap kebijakan
2	Pengkoordinasian perangkat daerah belum optimal	<ul style="list-style-type: none">• Pemahaman SAKIP masih belum optimal• Pengumpulan data LPPD belum optimal	Peningkatan kompetensi SDM terhadap SAKIP

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan tersebut diatas, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya penerapan kebijakan daerah;
2. Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melibatkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan rumusan kebijakan (sektoral);
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah; dan
4. Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Kabupaten Sidoarjo dengan Bupati terpilih yang menjabat saat ini menetapkan visi pembangunan (5) lima tahun kedepan dengan bunyi **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”**. Visi ini didukung oleh (5) lima misi untuk mewujudkannya. Adapun misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
3. Membangun infrasktruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
4. Membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya; dan
5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Sebagaimana RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo mendukung Misi 1, Tujuan 1, serta Sasaran 1 dan Sasaran 2 dengan telaahan sebagai berikut :

Misi 1 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha

Tujuan 1:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha

Indikator tujuan:

Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 1	Indikator Sasaran 1
1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital	1. Nilai SAKIP Kabupaten
	2. Status Kinerja LPPD
Sasaran 2	Indikator Sasaran 2
2. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan rangka mendukung kemudahan berusaha	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, terdapat 3 (tiga) program yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu :

- 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2. Program Perekonomian dan Pembangunan; dan
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan, maka disusun 17 (tujuh belas) Program Strategis yang merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2021-2026, yaitu :

- 1. 100.000 lapangan kerja baru;

2. BPJS Kesehatan gratis seluruh warga;
3. Gratis makanan tiap hari warga miskin;
4. 10.000 beasiswa kuliah;
5. Insentif plus guru ngaji dan guru agama;
6. 5.000.000-50.000.000 modal usaha mikro perempuan;
7. 6.000.000 operasional bagi RT;
8. 20.000 UMKM naik kelas;
9. Penataan kota dan transportasi terpadu urai kemacetan;
10. Tingkatkan kesejahteraan tenaga Kesehatan dan kader posyandu;
11. Tingkatkan kesejahteraan GTT, guru swasta, dan tenaga honorer;
12. *Youth Center*, bangun pusat kreativitas anak muda;
13. 2.000 warung rakyat direnovasi;
14. Tingkatkan ADD untuk desa sejahtera;
15. 24 jam pengaduan rakyat respon cepat;
16. Reformasi perijinan untuk bisnis yang kondusif; dan
17. Perluasan RTH, revitalisasi sungai, revolusi manajemen sampah.

Dari 17 (tujuh belas) Program Prioritas tersebut diturunkan dalam Program Prioritas Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Program Prioritas ke 4 (empat) yaitu 10.000 beasiswa kuliah, Program Prioritas ini dilaksanakan dalam Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yakni Bagian Kesejahteraan Rakyat.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Sekretaris Negara dan Renstra Provinsi

Berikut telaah tentang sasaran strategis Kementerian Sekretaris Negara serta Merujuk pada SOTK Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat bahwasannya terdapat beberapa sasaran yang bersentuhan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 3.2
Telaah Kementerian Sekretaris Negara

No.	Sasaran Kementerian Sekretaris Negara	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	Pada tahap perumusan awal Kualitas Kebijakan yakni agenda setting, kurang melibatkan partisipasi publik	Kurang melibatkan partisipasi publik, sehingga hasil akhir Indeks Kualitas Kebijakan masih rendah	Adanya bukti dukung dalam proses penyusunan kebijakan
2	Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum mencapai target yang sudah ditentukan	Melakukan pendampingan untuk meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Telaah pada renstra provinsi dilakukan untuk mengakomodir berbagai agenda pembangunan yang memerlukan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu untuk melihat beberapa hal yang mungkin akan menghambat pembangunan di kabupaten atau kota yang berhubungan dengan Tupoksi Sekretariat daerah. Merujuk pada SOTK Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dapat dilihat bahwasannya terdapat beberapa kewenangan yang memiliki sasaran maupun kebijakan yang bersentuhan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo :

1. Penggalian atau analisa pada potensi perumusan kebijakan pada pengelolaan fasilitasi dibidang mental kerohaian / spiritual , pendidikan,

- kepemudaan, pelayanan sosial dan kesehatan dimana tentunya diperlukan dukungan dana;
2. Mengembangkan nilai tambah (*added value*) komoditas unggulan lokal yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan;
 3. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk halal lokal berbasis *on line* yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen;
 4. Mendorong kemudahan investasi baru, berkembangnya ekonomi digital melalui *start up* bisnis dan industri kreatif;
 5. Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi tumbuhkembangnya ekonomi lokal dan Usaha Mikro;
 6. Pengembangan pertanian berbasis teknologi dan penguatan sistem ketahanan pangan daerah;
 7. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada lima tahun mendatang untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan APBD yang tentunya membutuhkan tambahan alokasi sumber daya;
 8. Memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada penyedia/pengusaha untuk dapat menayangkan produk di katalog elektronik dan toko daring. Sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya penyedia/pengusaha yang masuk ke dalam katalog elektronik dan toko daring, maka dapat mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik dan toko daring;
 9. Penilaian kinerja sistem akuntabilitas kinerja;
 10. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai; dan
 11. Penggalan atau Analisa pada potensi perumusan kebijakan pada pengelolaan fasilitasi di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum dan kerja sama.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan hasil telaahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah bahwa percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi peluang kinerja Sekretariat Daerah pada lima tahun mendatang akan mempercepat pula rencana pengembangan wilayah berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam lima tahu mendatang peluang program strategis yang akan diupayakan untuk dapat terwujud adalah pembangunan *Frontage Road* dan RSUD Wilayah Sidoarjo Barat. Termasuk pada percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada proyek–proyek strategis, serta pemanfaatan lahan untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Sedangkan hasil telaahan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bahwa Sekretariat Daerah sebagai koordinator Perangkat Daerah perlu menyusun kebijakan untuk memanfaatkan alokasi anggaran yang ada pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini dilakukan dengan mengupayakan agar alokasi anggaran yang ditetapkan dalam anggaran kas terealisasi tepat waktu, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Sidoarjo disusun untuk pembenahan dan peningkatan kinerja.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka dilakukan analisis masalah, dimana Metode yang dipakai dalam menganalisis adalah dengan menggunakan

analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities and Threats*) yang diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis Lingkungan Internal Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam melaksanakan tugas di bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Analisis Lingkungan Internal

KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
1. Tugas pokok dan fungsi yang jelas 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur 3. Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan 4. Dukungan prasarana dan sarana yang memadai	1. Kurang optimalnya penerapan kebijakan daerah 2. Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melibatkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan rumusan kebijakan (sektoral) 3. Nilai Sakip Perangkat Daerah 4. Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Sedangkan Analisis Lingkungan eksternal terdiri dari Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Analisis Lingkungan Eksternal

PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)	ANCAMAN (<i>THREAT</i>)

(1) Pengoptimalan penerapan kebijakan Daerah (2) Mewujudkan fungsi koordinasi penyusunan rumusan kebijakan (3) Peningkatan Nilai Sakip Perangkat Daerah (4) Peningkatan Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah (5) Indeks Pelayanan Publik oleh Perangkat daerah yang menjadi <i>Role Model</i>	(1) Kurangnya disiplin dan budaya kerja yang kurang profesional (2) Kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas (3) Pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang rutinitas (4) PD tidak tertib dan komitmen dalam mewujudkan target kinerjanya
--	--

Berdasarkan analisis Lingkungan eksternal dan analisis Lingkungan internal di atas, dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*), maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Strategi SO
Daya gunakan kekuatan, manfaatkan peluang.
- b. Strategi ST
Daya gunakan Kekuatan, Hindari Ancaman.
- c. Strategi WO
Atasi kelemahan, manfaatkan peluang.
- d. Strategi WT
Meminimalkan kelemahan, hindari ancaman.

Sebagai hasil interaksi atau pemetaan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dengan mengacu pada kata kunci tersebut, dituangkan ke dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Pemetaan Analisis Lingkungan
Eksternal dan Internal

<div> <div>ALI</div> <div>ALE</div> </div>	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	(1) Tugas pokok dan fungsi yang jelas (2) Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur (3) Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan (4) Dukungan prasarana dan sarana yang memadai	(1) Kurang optimalnya penerapan kebijakan daerah (2) Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melibatkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan rumusan kebijakan (sektoral). (3) Nilai Sakip Perangkat Daerah (4) Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah
PELUANG (O)	(S) + (O)	(W) + (O)
(1) Pengoptimalan penerapan kebijakan Daerah (2) Mewujudkan fungsi koordinasi penyusunan rumusan kebijakan (3) Peningkatan Nilai Sakip Perangkat Daerah (4) Peningkatan Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah	Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas, mengoptimalkan Sumber Daya aparatur, adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja Aparatur PNS serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai demi mengoptimalkan Kebijakan daerah, mewujudkan fungsi koordinasi penyusunan rumusan kebijakan, meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah, Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah dan peningkatan Indeks Pelayanan Publik oleh Perangkat daerah yang menjadi <i>Role Model</i> (S1,2,3,4 – O1,2,3,4,5)	1. Mengoptimalkan penerapan kebijakan Daerah (W1– O1). 2. Mewujudkan fungsi koordinasi penyusunan rumusan kebijakan 3. Meningkatkan Nilai Sakip Perangkat Daerah 4. Meningkatkan Kualitas Data LPPD Perangkat Daerah
ANCAMAN (T)	(S) + (T)	(W) + (T)
(1) Kurangnya disiplin dan budaya kerja yang kurang profesional (2) Kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas . (3) Pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang rutinitas (4) PD tidak tertib dan komitmen dalam mewujudkan target kinerjanya	1. Mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas (S1, - T2) 2. Mendayagunakan SDM aparatur dan adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan untuk mengatasi kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah (S2,3 – T1)	1. Meminimalkan kurangnya pemahaman tupoksi dan mengintensifkan koordinasi antar PD untuk pengoptimalan penerapan kebijakan dan fungsi koordinasi penyusunan rumusan kebijakan (W1,2 – T4) 2. Meningkatkan kinerja dan koordinasi untuk peningkatan Nilai SAKIP, LPPD dan IPP (W3,4,5 – T4)

Adapun Isu Strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Kurangnya monitoring dalam penyusunan SAKIP Perangkat Daerah; dan
2. Kurangnya data pendukung dalam penyusunan data LPPD Perangkat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Rencana Strategis mengacu visi dan misi kepala daerah yang terpilih, untuk menyelaraskan maka perlu menerjemahkan sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan kepala daerah. Maka sesuai dengan Tupoksi Sekretariat Daerah berikut Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diakomodir oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo :

“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan”

Penyelenggaraan pelayanan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berfungsi memfasilitasi perumusan kebijakan. Sekretariat Daerah memberikan pelayanan harus menetapkan suatu tujuan sebagai arahan Sekretariat Daerah di masa yang akan datang. Penentuan Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Tujuan adalah tahap perumusan yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Sekretariat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah wajib mendukung visi dan misi Bupati Sidoarjo yang dijabarkan pada sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Tujuan Sekretariat Daerah harus mengacu dengan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Berikut tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

4.1.2 Sasaran

Setelah menetapkan tujuan maka ditetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Sekretariat Daerah menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup:

“Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah”

Untuk memperoleh sasaran yang dapat dicapai maka ditentukan suatu indikator kinerja. Indikator kinerja disusun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah. Indikator Kinerja direncanakan dalam periode lima tahun. Tabel pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah sampai indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disusun dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo

No	Visi	Misi	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		1. Status Kinerja LPPD	T (4,00)	ST (4,21)	ST (4,3)	ST (4,4)	ST (4,45)	ST (4,5)
					2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A- 4,3	A- 4,32	A- 4,35	A- 4,4	A- 4,45	A- 4,49
					3. Nilai SAKIP	A (80,1)	A (80,5)	A (81)	A (81,5)	A (85)	AA (90,01)

	1.Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	1. Indeks Kualitas Kebijakan	NA	70	72	75	77	80
		2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	50%	75%	77%	78%	80%	100%
		3. Persentase Kinerja Urusan tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	66%	66%	100%	100%	100%
		5. Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP)	NA	88	88,5	89	89,5	90
	2.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	1. Nilai SAKIP PD	82 (A)	84 (A)	84,5 (A)	84,7 (A)	85 (A)	85,5 (A)
		2. Nilai RB	33,91 (93,42 %)	34,48 (95%)	34,85 (96%)	35,21 (97%)	35,57 (98%)	36,3 (100%)
		3. Nilai IPP	B (3,88)	A- (4,01)	A- (4,10)	A- (4,20)	A- (4,30)	A (4,51)
		4. Nilai IKM/SKM	90 (Sangat Baik)	90,50 (Sangat Baik)	91 (Sangat Baik)	91,50 (Sangat Baik)	92 (Sangat Baik)	92,50 (Sangat Baik)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rincian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Visi	Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan		
Misi I	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Penguatan penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah	Penyusunan Kebijakan daerah yang implementatif dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah
		<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan SPM- Meningkatkan capaian penyelenggaraan pemerintah daerah- Meningkatkan capaian kinerja penyelenggraan pemerintahan umum- Meningkatkan capaian kinerja urusan dukcapil,kesbangpol, trantibum, pemdes	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan IKK oleh masing-masing perangkat daerah terkait- Pemenuhan bukti dan pendukung IKK dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah- Penginputan IKK kedalam RPJMD- Penguatan Kapasitas masing masing perangkat daerah terkait penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatkan capaian kinerja lingkungan bersih,sehat,cerdas dan tahan ekonomi	<ul style="list-style-type: none">- Penguatan koordinasi,sinkronisasi serta integrasi antar perangkat daerah dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah- Pembuatan Juklak/Tata Cara penyelenggaraan lomba lomba yang meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

			<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan sistem integrasi dan sinkronisasi sistem pelaporan - Pembuatan Website LPPD dan SPM
		Mempercepat tersusunnya kebijakan administrasi kewilayahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penyusunan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan - Percepatan fasilitasi penyelesaian batas desa/kecamatan dan wilayah
		Mewujudkan kecamatan dan kelurahan berkinerja baik	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penyusunan laporan rupabumi di Kabupaten Sidoarjo - Percepatan penetapan batas wilayah di Kab Sidoarjo - Percepatan pemenuhan IKK, nilai sakip dan pelayanan publik bagi kecamatan dan kelurahan
		Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kerjasama daerah dengan daerah lain, daerah dengan pihak ke 3, daerah dengan luar negeri, daerah dengan Lembaga luar negeri - Melakukan Pengalihan data potensi Kerjasama - Melakukan inisiasi Kerjasama dengan wilayah perbatasan - Melakukan sosialisasi tata cara Kerjasama daerah kepada Perangkat daerah - Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka inisiasi dan evaluasi Kerjasama - Melakukan asistensi penyusunan naskah Kerjasama - Meningkatkan koordinasi inisiasi Kerjasama - Mengoptimalkan pemanfaatan laporan hasil Kerjasama sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kerjasama

		Mendorong langkah percepatan pencapaian target Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, SPM dan penyelenggaraan pemerintahan umum	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan integrasi antar perangkat daerah- Mengoptimalkan percepatan pemenuhan data dukung IKK- Mempercepat pelaksanaan seluruh hasil rekomendasi oleh tim evaluator oleh perangkat daerah- Meningkatkan intensitas pelaksanaan konsultasi kepada tim evaluasi- Menyusun tatacara pelaksanaan lomba lomba dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penysunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Umum
		Mendorong langkah percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sesuai target dibidang administrasi kewilayahan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan kewilayahan dengan seluruh pihak terkait- Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan di kecamatan dan kelurahan- Meningkatkan pelaksanaan monev kinerja kecamatan dan kelurahan- Meningkatkan pelaksanaan monev pelimpahan Sebagian kewenangan bupati kepada camat- Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat- Mempercepat penyelesaian penyusunan kebijakan kewilayahan,

			kecamatan dan kelurahan
		Mendorong langkah optimalisasi Kerjasama sesuai target dan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah terkait pelaksanaan Kerjasama - Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, luar negeri dan Lembaga luar negeri
		Meningkatkan nilai-nilai spiritual masyarakat Sidoarjo	- Meningkatkan prestasi Kafilah MTQ Kabupaten, Provinsi , dan Nasional
			- Meningkatkan prestasi beasiswa bagi Mahasiswa, Santri, dan Hafizh-Hafizhah
		Fasilitasi kegiatan Bina Mental Spiritual	- Meningkatkan pelayanan CJH masyarakat Kab. Sidoarjo
			- Mewujudkan kegiatan-kegiatan Mental Spiritual
			- Pemberian bantuan hibah pada tempat ibadah dan lembaga keagamaan muslim dan non muslim
		Mendorong perumusan kebijakan Bina Mental Spiritual	- Penyusunan Juknis Musababqah Tilawatil Qur'an tingkat Kecamatan dan Kabupaten
			- Penyusunan SOP alur permohonan bantuan tempat ibadah
			- Penyusunan pedoman dan juknis seleksi Hafiz-Hafizha, pembina Qori, serta beasiswa bagi Mahasiswa dan Santri
		Mendorong langkah percepatan pelaksanaan kegiatan yang sesuai target di bidang kesejahteraan sosial	- Meningkatkan koordinasi OPD terkait untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
			- Meningkatkan penyusunan perumusan kebijakan di Bidang Kesejahteraan sosial, Pendidikan, kebudayaan, kesehatan,

			tenaga kerja, kesejahteraan sosial, transmigrasi, pengendalian Penduduk dan P3AKB
			- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang di Bidang Kesejahteraan sosial, Pendidikan, kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, kesejahteraan sosial, transmigrasi, pengendalian Penduduk dan P3AKB
		Mendorong langkah percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sesuai target di bidang Kemasyarakatan	- Meningkatkan koordinasi OPD terkait untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
			- Meningkatkan penyusunan perumusan kebijakan di Bidang kepemudaan dan olah raga
			- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang kepemudaan dan olah raga
		Penyusunan kebijakan daerah yang mendukung berkembangnya sektor strategis yaitu perdagangan, investasi, industri dan jasa	Optimalisasi penyusunan kebijakan (policy brief), koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi di bidang perdagangan, investasi, industri dan jasa
		Intensifikasi pertanian dan perikanan berbasis teknologi tepat guna	Optimalisasi penyusunan kebijakan (policy brief), koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi di bidang pertanian dan perikanan serta sumber daya alam
		Kebijakan stimulus untuk mendorong berkembangnya koperasi dan usaha mikro	Optimalisasi penyusunan kebijakan (policy brief), koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha mikro dan inklusi keuangan
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BUMD dan BLUD, dan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan untuk mendorong	Optimalisasi penyusunan kebijakan (policy brief), koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi di bidang BUMD dan BLUD

		pengelolaan potensi daerah secara optimal	
		Kemitraan dengan perusahaan bidang ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan angkatan kerja lokal	Koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan
		Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas	Koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang pembinaan wirausaha baru
		Integrasi program lintas urusan secara tepat sasaran melalui implementasi 17 Program Prioritas	Koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang mendukung implementasi 17 Program Prioritas
		Optimalisasi implementasi kebijakan bidang administrasi dan pengendalian pembangunan	Penyusunan kebijakan bidang administrasi dan pengendalian pembangunan yang mempertimbangkan aspek digitalisasi
		Mendorong langkah percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang sesuai target	Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan secara berkala dengan memberikan penilaian progres
		Besaran nilai standart harga yang ditetapkan sesuai dengan batas kewajaran	Penyusunan standart harga yang menyesuaikan harga retail untuk menjadi acuan perencanaan belanja daerah
		Penguatan kapasitas dan kapabilitas ASN secara bertahap	- Optimalisasi Kegiatan Bimbingan Teknis, sosialisasi dan pelatihan kepada OPD dan Desa
			- Mendorong pelaku pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
			- Meningkatkan intensitas layanan pendampingan dan konsultasi bagi pelaku pengadaan barang/jasa
			- Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SOP
		Penyusunan dan implementasi SOP secara konsekuen dan berkelanjutan	

			- Penerapan kebijakan penilaian kinerja penyedia untuk menunjang proses pengadaan barang/jasa sesuai SOP
		Penguatan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT)	- Mendorong OPD dalam mewujudkan digitalisasi pengadaan barang/jasa dengan menerbitkan aturan dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
			- Mendorong pemanfaatan toko daring dan katalog elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan bidang pelayanan publik - Fasilitasi penguatan Inovasi pelayanan publik bagi unit kerja - Penguatan ketatalaksanaan - Monitoring Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 	Mewujudkan pelayanan publik yang prima
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas kebijakan menunjang akuntabilitas kinerja - Membentuk tim Reformasi Birokrasi, tim SAKIP Kabupaten - Fasilitasi dan koordinasi Pengukuran Kinerja Kabupaten dan Perangkat Daerah - Fasilitasi dan koordinasi pengukuran capaian RB Kabupaten dan Perangkat Daerah - Pembinaan budaya kinerja organisasi - Pembinaan Zona integritas (WBK dan WBBM) 	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas kebijakan menunjang kelembagaan - Penataan kelembagaan sesuai dengan regulasi dan kondisi ideal untuk mencapai tujuan 	Organisasi/kelembagaan yang adaptif dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan

		<p>dalam melaksanakan urusan</p> <ul style="list-style-type: none">- Menyusun analisa jabatan- Melaksanakan analisa beban kerja dan peta jabatan	
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah. Penjabaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan indikator dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan			SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)			DO dan Formu lasi			Dat a Cap aian pad a Tah un Aw al Per enc ana an (Ta hun 202 0)			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerj a Per ang kat Dae rah Pen ang gun g Jaw ab		Ket era nga n					
															Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)	
															Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp					Tar get	Rp	Tar get	Rp
19			20			21			22			23			24		25		26		27		28		29		29		30		31	

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan dan koordinasi dibawah koordinasi Asisten Administrasi Pemerintahan dan kesra	1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesra	Hasil Survey kualitas kebijakan daerah yang diimplementasikan di bidang Pemerintahan dan Kesra	NA	NA	10.86 0.864 .916	70	13.76 9.924 .054	72	23.77 1.840 .638	75	27.56 5.517 .858	77	33.11 1.210 .162	80	39.16 2.072 .661	80	48.05 2.486 .723	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
		2. Persentase Kinerja Urusan tercapai	DO : (Jumlah urusan dengan target kinerja tercapai / Jumlah urusan yang dilaksanakan	100 %	100 %	911.5 78.14 9	100 %	1.778 .824. 893	100 %	10.05 6.917 .614	100 %	10.20 6.917 .614	100 %	10.35 6.917 .614	100 %	10.50 6.917 .614	100 %	10.50 6.917 .614	Asisten Pemerintahan dan Kesra	

				Pemd a) x 100% #Bagia n Pemer intaha n																
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya Kualitas produk hukum daerah dalam rangka menjamin kepastian hukum	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi	Jumla h Ranca ngan produk hukum daerah yang difasilit asi / Jumla h Ranca ngan Produ k hukum daerah yang diusulk	100 %	100 %	Rp 355.3 46.18 6	100 %	Rp 418.4 82.50 0	100 %	Rp 485.5 00.00 0	100 %	Rp 535.0 00.00 0	100 %	Rp 590.0 00.00 0	100 %	Rp 650.0 00.00 0	100 %	Rp 650.0 00.00 0	Bag. Huk um setd a Kab upat en Sido arjo	

					an X 100 %																
		Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Penyuluhan Hukum	1. Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	Jumlah Permasalahan Hukum yang difasilitasi / Jumlah Kasus Hukum yang masuk X 100 %	100 %	100 %	Rp 1.315.606.150	100 %	Rp 920.600.000	100 %	Rp 1.115.248.138	100 %	Rp 1.285.035.358	100 %	Rp 1.481.040.662	100 %	Rp 1.707.196.761	100 %	Rp 7.824.727.069	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo	

			2. Persentase penyuluhan hukum yang difasilitasi	Jumlah penyuluhan hukum terpadu yang difasilitasi pada tahun N / Jumlah penyuluhan hukum pada tahun N X 100%	100 %	100 %	Rp 40.688.850	100 %	Rp 45.000.000	100 %	Rp 50.000.000	100 %	Rp 55.000.000	100 %	Rp 60.000.000	100 %	Rp 65.000.000	100 %	Rp 315.688.850	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo	
		Meningkatnya Kualitas Kajian dan Dokumentasi Hukum yang baik	1. Persentase doktasi informasi produk hukum daerah yang dipublikasikan	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan (manual dan	100 %	100 %	Rp 343.726.568	100 %	Rp 430.375.000	100 %	Rp 451.893.750	100 %	Rp 473.412.500	100 %	Rp 494.931.250	100 %	Rp 529.361.250	100 %	Rp 529.361.250	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo	

				digital) / Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan X 100%																	
				2. Jumlah Kajian produk hukum daerah	5	5	Rp 114.575.523	5	Rp 297.596.084	5	Rp 82.398.750	5	-Rp 387.090.000	5	Rp 90.246.250	5	Rp 96.524.250	5	Rp 2.284.579.250	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya Raperda untuk dilakukan pembahasan di tingkat Legislatif		Persentase penetapan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	Rp 355.346.186	100 %	Rp 418.482.500		Rp 485.500.000		Rp 535.000.000		Rp 590.000.000		Rp 650.000.000		Rp 650.000.000	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo	

					umum DPRD pada tahun N X 100%																	
			Terfasilitasi sinya Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	NA	NA		NA		300 Dok ume n		300 Dok ume n		300 Dok ume n		300 Dok ume n		300 Dok ume n		Bag. Huk um setd a Kab upat en Sido arjo	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksana nya terfasilitasi ya proses penyelesai an permasalah an Hukum Litigasi di setiap tingkat peradilan dan lembaga lain yang dipersamak an dengan		Persentas e penyelesa ian permasala han hukum Litigasi yang difasilitasi penyelesa iannya	100 %	100 %	Rp 1.356 .295. 000	100 %	Rp 965.6 00.00 0		Rp 1.165 .248. 138		Rp 1.340 .035. 358		Rp 1.541 .040. 662		Rp 1.772 .196. 761		Rp 2.038 .026. 275	Bag. Huk um setd a Kab upat en Sido arjo	

			penyelesai an sengketa di peradilan			tahun N / Jumla h permin taan bantua n hukum terkait perma salaha n hukum litigasi pada tahun N X 100%																	
			Terlaksana nya Penyelesai an Permasala han Hukum Non Litigasi meliputi konsultasi hukum, pendapat hukum, monev bantuan		Persentas e Penyelesa ian permasala han hukum Non Litigasi yang difasilitasi penyelesa iannya	Jumla h penan ganan bantua n hukum terkait perma salaha n hukum non litigasi	100 %	100 %		100 %												Bag. Huk um setd a Kab upat en Sido arjo	

			hukum dan koordinasi bantuan hukum dengan instansi terkait			yang difasilitasi pada tahun N / Jumlah permintaan bantuan hukum terkait permasalahan hukum non litigasi pada tahun N X 100%																	
			Meningkatnya Pemahaman Hukum terkait Peraturan yang berlaku bagi		Persentase terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum terpadu	Jumlah penyuluhan hukum terpadu yang difasilitasi	100 %	100 %		100 %												Bag. Hukum setda Kabupaten	

			Peserta penyuluhan Hukum			pada tahun N / Jumlah penyuluhan hukum pada tahun N X 100%															Sidoarjo		
			Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum		NA	NA		NA		10 Kasus		10 Kasus		10 Kasus		10 Kasus		10 Kasus		Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pengkajian/ evaluasi Produk Hukum Daerah sesuai dengan Peraturan yang		Jumlah hasil produk hukum yang dilakukan pengkajian atau evaluasi	Jumlah produk hukum yang dilakukan pengkajian pada	5	5	Rp 458.302.091	5	Rp 727.971.084		Rp 534.292.500		Rp 86.322.500		Rp 585.177.500		Rp 625.885.500		Rp 2.813.940.500	Bag. Hukum setda Kabupaten Sidoarjo	

						mentasikan (manual dan elektronik) pada tahun N)) / [(Jumlah produk hukum yang ditetapkan pada tahun n-1 + Jumlah produk hukum yang ditetapkan pada tahun N)) x 100%																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		NA	NA		NA		300 Dokumen		300 Dokumen		300 Dokumen		300 Dokumen		300 Dokumen		Bag. Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Optimalisasi kualitas penyusunan kebijakan bidang Pemerintahan		Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan	Hasil Survey kualitas kebijakan daerah di bidang Pemerintahan	NA	NA	Rp 361.761.640	70	Rp 732.518.198	72	Rp 8.025.609.850	75	Rp 8.125.609.850	77	Rp 8.225.609.850	80	Rp 8.325.609.850	80	Rp 8.325.609.850	Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo	
		Optimalisasi Kinerja urusan Pemerintahan		1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pemerintahan (Dispendu	DO : (Jumlah OPD di bidang pemerintahan dengan Nilai SAKIP	100 %	100 %	Rp -	14,28 %	Rp -	47,61 %	Rp -	71,42 %	Rp -	76,19 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten	

					kcapil, Bakesban g, Satpol PP, Kecamata n)	minim al A / Jumla h seluru h OPD di bidang pemer intahan) x 100%															Sido arjo		
					2. Persentas e kinerja urusan tercapai di bidang pemerinta han	DO : (Jumla h urusan di bidang pemer intahan denga n target kinerja tercap ai / Jumla h urusan yang diamp u bidang	100 %	100 %	Rp 549.8 16.50 9	100 %	Rp 1.046 .306. 695	100 %	Rp 2.031 .307. 764	100 %	Rp 2.081 .307. 764	100 %	Rp 2.131 .307. 764	100 %	Rp 2.181 .307. 764	100 %	Rp 2.181 .307. 764	Bag. Pem erint aha n Setd a Kab upat en Sido arjo	

					pemerintahan) x 100%																	
				3. Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan (Dispendukcapil)	DO : (Jumlah OPD Role Model di bidang pemerintahan dengan kategori minimal A- / Jumlah OPD Role Model di bidang pemerintahan) x 100% #Dispe	A-	A-	Rp-	A-	Rp-	A-	Rp-	A-	Rp-	A	Rp-	A-	Rp-	A-	Rp-	Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo	

					ndukc apil																	
					DO: Hasil penilai an Area Interve nsi MCP Formul a: Hasil penilai an masin g- masin g area interve nsi x bobot / jumlah area interve nsi Hasil penilai an dari	NA	NA		93		93,5		94		94,5		95		95		Bag. Pem erint aha n Setd a Kab upat en Sido arjo	

						KPK-RI																	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya kinerja administrasi pemerintahan			Persentase PD yang telah dilakukan monev administrasi pemerintahan dengan kategori Baik	(Jumlah PD dimonev dengan kategori Baik / Jumlah seluruh PD) x 100%	NA	NA	Rp 74.704.813	100 %	Rp 37.965.609	Rp 2.400.000.000		Rp 2.500.000.000		Rp 2.600.000.000		Rp 2.700.000.000		Rp 2.700.000.000	Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		NA	NA	NA	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten	

																						Sidoarjo		
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan SPM			Jumlah laporan capaian standar pelayanan minimal yang disusun (1 laporan)	Hasil monev Capaian kinerja SPM	ST	NA	Rp 287.056.827	ST	Rp 694.552.589		Rp 5.625.609.850		Rp 5.625.609.850		Rp 5.625.609.850		Rp 5.625.609.850		Rp 5.625.609.850	Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun (2 laporan)	Hasil Monev penyelenggaraan pemerintahan daerah	ST (2018 3,549)	NA		ST (4,21)											Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo		

					(Dispendu kcapil)	denga n katego ri minim al A- / Jumla h OPD Role Model di bidang pemer ntahan) x 100% #Dispe ndukc apil															en Sido arjo		
			Terlaksan anya Fasilitas Pelaksana an Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksana an Otonomi Daerah		NA	NA		NA		2 Dok ume n		2 Dok ume n		2 Dok ume n		2 Dok ume n		2 Dok ume n		Bag. Pem erint aha n Setd a Kab upat en Sido arjo	

		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tersusunnya rumusan kebijakan bidang administrasi kewilayahan			1. Persentase rumusan kebijakan administrasi kewilayahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Rumusan Kebijakan Kewilayahan yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum / Jumlah rumusan kebijakan x 100 %	NA	100 %	Rp 549.816.509	100 %	Rp 1.046.306.695,00	Rp 2.031.307.764,00	Rp 2.081.307.764,00	Rp 2.131.307.764,00	Rp 2.181.307.764,00	Rp 2.181.307.764,00	Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo	
						2. Persentase kecamatan yang telah inventarisasi data gasetir/rup	jumlah kecamatan yang melakukan inventarisasi	NA	100 %		5%							Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten	

					abumi unsur buatan	data gasetir /rupab umi unsur buatan / seluru h kecam atan x 100 %															en Sido arjo	
					3. Persentas e desa dan kelurahan yang sudah dilakukan penegasa n batas desa dan kelurahan secara yuridis (perbup)	Titik pilar batas yang ditetap kan / titik pilar yang disusu n x 100 %	NA	100 %		5%											Bag. Pem erint aha n Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Terwujudny a Kecamatan dan Kelurahan		1. Persentas e Kecamata n dengan	Jumla h kecam atan denga	27%	44%		66%											Bag. Pem erint aha n Setd	

			yang berkinerja baik		Nilai SAKIP A	n nilai sakup A / jumlah nilai sakup seluru h kecam atan x 100%															a Kab upat en Sido arjo	
					2. Persentas e kinerja urusan kecamata n yang tercapai	Jumla h kinerja urusan kecam atan yang tercap ai / jumlah seluru h kinerja kecam atan x 100%	16%	50%		66%											Bag. Pem erint aha n Setd a Kab upat en Sido arjo	

						x 100%																	
			Terlaksan anya Pengelola an Administra si Kewilayah an		Jumlah Dokumen Hasil Pengelola an Administra si Kewilayah an		NA	NA		NA		4 Dok ume n		4 Dok ume n		4 Dok ume n		4 Dok ume n		4 Dok ume n		Bag. Pem erint aha n Setd a Kab upat en Sido arjo	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Meningkatn ya Fasilitasi kerjasama daerah		Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanj ut i ke dalam naskah kerjasama daerah	DO : KEBIJ AKAN : Jumla h fasilita si kerjas ama yang ditinda klanjuti ke dalam	100 %	100 %	Rp 506.2 42.59 1	100 %	Rp 732.5 06.69 5	100 %	Rp 2.250 .000. 000	100 %	Rp 2.400 .000. 000	100 %	Rp 2.550 .000. 000	100 %	Rp 2.700 .000. 000	100 %	Rp 2.700 .000. 000		Bag. Kerj a Sam a Setd a Kab upat en Sido arjo	

					naskah kerjasama / Seluruh kerjasama yang difasilitasi x 100%																
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Meningkatnya fasilitasi kerjasama dalam negeri		Persentase fasilitasi kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama	Jumlah fasilitasi kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama / Seluruh kerjasama	100 %	100 %	Rp 378.545.091	100 %	Rp 418.890.028		Rp 450.000.000		Rp 500.000.000		Rp 550.000.000		Rp 600.000.000		Rp 600.000.000	Bag. Kerja Sama Setda Kabupaten Sidoarjo

						ama yang di fasilita si x 100%																	
			Terlaksan anya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		NA	NA		NA		20 Do ku me n		20 Do ku me n		20 Do ku me n		20 Do ku me n		20 Do ku me n		Bag. Kerj a Sam a Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Meningkaty a fasilitasi kerjasama luar negeri		Persentas e fasilitasi kerjasama luar negeri yang ditindakla njudi ke dalam naskah kerjasama	Jumla h fasilita si kerjas ama luar negeri yang ditinda klanjudi ke dalam naska	100 %	100 %	Rp 99.67 6.500	100 %	Rp 256.3 91.66 7		Rp 1.700 .000. 000		Rp 1.750 .000. 000		Rp 1.800 .000. 000		Rp 1.850 .000. 000		Rp 1.850 .000. 000	Bag. Kerj a Sam a Setd a Kab upat en Sido arjo	

			dalam Naskah Kerjasama			seluruh kerjasama yang dilaksanakan) x 100%														en Sidoarjo		
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		NA	NA		NA		21 Laporan		21 Laporan		21 Laporan		21 Laporan		21 Laporan	Bag. Kerja Sama Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tersusunnya kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang diterapkan	1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Hasil Survey kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan	NA	NA	Rp 3.651.124.478	70	Rp 10.159.651.900	72	Rp 18.000.000.000	75	Rp 21.600.000.000	77	Rp 25.920.000.000	80	Rp 31.104.000.000	80	Rp 31.415.040.000	Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo		

					rakyat dan kemasyarakatan																
				2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	DO : (Jumlah OPD di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan dengan Nilai SAKIP minimal A / Jumlah seluruh OPD di bidang Keseja	20%	50%		75,00%	77,00%		78%		80%		100%		100%		Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo	

				hteraan Rakyat dan kemas yaraka tan) x 100%																	
			3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	DO : (Jumlah urusan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan dengan target kinerja tercapai / Jumlah urusan yang diamp	100 %	100 %	Rp 4.533 .554. 570	100 %	Rp 765.7 11.87 5	100 %	Rp 1.336 .800. 000	100 %	Rp 1.604 .160. 000	100 %	Rp 1.924 .992. 000	100 %	Rp 2.309 .990. 400	100 %	Rp 2.333 .090. 304	Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo	

				u bidang Keseja hteraa n Rakyat dan kemas yaraka tan) x 100%																	
			4. Nilai IPP PD role model di bidang Kesejahteraa n Rakyat dan kemasyaraka tan (RSUD)	DO : (Jumla h OPD Role Model di bidang Keseja hteraa n Rakyat dan kemas yaraka tan denga n katego ri minim al A- / Jumla	A-	A-		A-		A-		A-		A-		A-		A-		Bag. Kesr a Setd a Kab upat en Sido arjo	

					h OPD Role Model di bidang Keseja hteraa n Rakyat dan kemas yaraka tan) x 100% #RSU D																	
				5. Jumlah mahasiswa berprestasi di bidang keagamaan yang mendapatka n beasiswa	Formul a: Jumla h realisa si mahas iswa berpre stasi di bidang keaga maan yang menda patkan	NA	NA		500 oran g		500 oran g		500 oran g		500 oran g		500 oran g		500 oran g		Bag. Kesr a Setd a Kab upat en Sido arjo	

					beasis wa DO: Jumla h realisa si mahas iswa berpre stasi di bidang keaga maan yang menda patkan beasis wa di tahun berken aan																	
	Fasilitasi Pengelolan Bina Mental Spiritual	Tersusunnya kebijakan bina mental spritual dan sarana ibadah		Persentas e rumusan Kebijakan Bina Mental Spritual dan ibadah yang	Jumla h Rumu san Kebija kan bina mental spiritu al dan	100 %	100 %	Rp 3.651 .124. 478	100 %	Rp 10.15 9.651 .900		Rp 18.00 0.000 .000		Rp 21.60 0.000 .000		Rp 25.92 0.000 .000		Rp 31.10 4.000 .000		31.41 5.040 .000	Bag. Kesra Setda Kab upat en Sido arjo	

[illegible]

						ev) x 100%																
			Terlaksan anya Fasilitasi Pengelola an Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelola an Bina Mental Spiritual		NA	NA		NA	2 Do ku me n	2 Do ku me n	2 Do ku me n	2 Do ku me n	2 Do ku me n	2 Do ku me n				Bag. Kesr a Setd a Kab upat en Sido arjo		
		Pelaksana an Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahte raan Sosial	Meningkatn ya capaian kinerja terkait Kesejahter aan Sosial		1. Persentas e PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahte raan Sosial (Dinas Kesehata n, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidika seluru	DO : (Jumla h OPD di bidang Keseja hteraa n Sosial denga n Nilai SAKIP minim al A / Jumla h seluru	NA	100 %	Rp 324.2 95.57 0	100 %	Rp 594.2 15.00 0	Rp 976.8 00.00 0	Rp 1.172 .160. 000	Rp 1.406 .592. 000	Rp 1.687 .910. 400	1.704 .789. 504				Bag. Kesr a Setd a Kab upat en Sido arjo		

						hteraa n Sosial) x 100%																		
					3. Nilai IPP PD role model di bidang kesejahter aan sosial dengan kategori minimal A- (RSUD)	DO : (Jumla h OPD Role Model di bidang Keseja hteraa n Sosial denga n katego ri minim al A- / Jumla h OPD Role Model di bidang Keseja hteraa n Sosial)	NA	A-		A-													Bag. Kesr a Setd a Kab upat en Sido arjo	

			Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		gan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB																		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)	DO : (Jumlah OPD di bidang Kesejahteraan masyarakat dengan Nilai SAKIP minimal A / Jumlah	NA	100 %	Rp 4.209.259.000	100 %	Rp 171.496.875	Rp 360.000.000	Rp 432.000.000	Rp 518.400.000	Rp 622.080.000	628.300.800		Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo						

							kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga yang dimonev) x 100%																		
			Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan		NA	NA		NA		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		Bag. Kesra Setda Kabupaten Sidoarjo	

			Perpustakaan, Kearsipan , Trantibum Linmas		n, Kebudaya an, Perpustak aan, Kearsipan , Trantibum Linmas																		
PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUNAN			Meningkatnya kualitas kebijakan dan koordinasi dibawah koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan	Hasil Survey kualitas kebijakan daerah yang diimplementasikan di bidang perekonomian dan pembangunan	NA	NA	11.13 8.906 .896	70	13.87 6.912 .543	72	#REF!	75	#REF!	77	#REF!	80	#REF!	80	#REF!	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		

		2. Indeks Pelaksanaan Pembangunan	DO : Hasil Survey Indeks Pelaksanaan Pembangunan	NA	84	1.124.786.645	85	1.457.276.740	86	4.400.000.000	88	4.550.000.000	89	4.700.000.000	90	5.000.000.000	90	5.000.000.000	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya kebijakan daerah di bidang perekonomian	1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian	Hasil Survey kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian	NA	NA	530.970.017,00	70	621.514.552,00	72	621.514.552,00	75	621.514.552,00	77	621.514.552,00	80	621.514.552,00	80	621.514.552,00	Bagian Perencanaan dan SDA Setda Kabupaten Sidoarjo	
		2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian	DO : (Jumlah OPD di bidang perekonomian	NA	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Bagian Perencanaan dan	

			dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)	n denga n Nilai SAKIP minim al A / Jumla h seluru h OPD di bidang pereko nomia n) x 100%															SDA Setd a Kab upat en Sido arjo		
			3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)	DO : (Jumla h urusan di bidang pereko nomia n denga n target kinerja tercap ai / Jumla h	NA	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Bagi an Pere kon omi an dan SDA Setd a Kab upat en Sido arjo	

				urusan yang diampu bidang perekonomian) x 100%																	
			4. Nilai IPP PD role model di bidang perekonomian (DPMPTSP)	DO : (Jumlah OPD Role Model di bidang pemerintahan dengan kategori minimal A- / Jumlah OPD Role Model di bidang pemerintahan) x	A-	A-	Rp -	A-	Rp -	A-	Rp -	A-	Rp -	A	Rp -	A-	Rp -	A-	Rp -	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sidoarjo	

				100% #Dispe ndukc apil																	
			5. Nilai Perijinan (Area Intervensi MCP)	DO: Hasil penilai an Area Interve nsi MCP Formul a: Hasil penilai an masin g- masin g area interve nsi x bobot / jumlah area interve nsi Hasil penilai an dari	NA	NA		100		100		100		100		100		100		Bagi an Pere kon omi an dan SDA Setd a Kab upat en Sido arjo	

					KPK-RI																	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tersusunnya dokumen kebijakan bidang BUMD dan BLUD		Jumlah rumusan kebijakan bidang BUMD & BLUD yang disusun	Jumlah dokumen kebijakan yang disusun Jumlah dokumen kebijakan yang disusun dalam satu tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 132.520.017	2 laporan	287.485.287,00		287.485.287,00		287.485.287,00		287.485.287,00		287.485.287,00		287.485.287,00		Subag BUMD & BLUD Setda Kabupaten Sidoarjo

						dokumen penatausahaan Bagian yang disusun dalam satu tahun																		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		NA	NA		NA		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen			Subag BUMD & BLUD Setda Kabupaten Sidoarjo	

		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	2 kali	2 kali	Rp 112.500.000	2 kali	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		Sub ag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo	
		Terlaksananya kegiatan pemberantasan BKC ilegal			Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran																				

						ran Baran g Kena Cukai ilegal (dalam satu tahun)																	
			Terlaksan anya Pengenda lian dan Distribusi Perekono mian		Jumlah Laporan Hasil Pengenda lian dan Distribusi Perekono mian		NA	NA		NA		2 Lap oran		2 Lap oran		2 Lap oran		2 Lap oran		2 Lap oran		Sub ag SDA Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Perencan aan dan Pengawas an Ekonomi Mikro kecil	Tersusunnya dokumen kebijakan bidang Perekonom ian		Jumlah rumusan kebijakan bidang Perekono mian yang disusun	Jumla h dokum en kebijak an yang disusu n Jumla h dokum en	1 lapo ran	2 lapo ran	Rp 285.9 50.00 0	2 lapo ran	Rp 309.0 29.26 5		309.0 29.26 5,00		309.0 29.26 5,00		309.0 29.26 5,00		309.0 29.26 5,00		309.0 29.26 5,00	Sub ag Pere kon omi an Setd a Kab upat en Sido arjo	

					(Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	x 100% PD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM															upat en Sidoarjo	
					3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	DO : (Jumlah urusan dengan target kinerja tercapai / Jumlah urusan) x 100% PD : Dinas Perind	NA	100 %		100 %											Sub ag Perekon omian Setda Kab upat en Sidoarjo	

						ustrian dan Perda ganga n, Dinas Koper asi dan UM																
			Terlaksan anya Perencan aan dan Pengawas an Ekonomi Mikro Kecil			Jumlah Dokumen Hasil Perencan aan dan Pengawas an Ekonomi Mikro Kecil	NA	NA		NA	8 Dok ume n		8 Dok ume n		8 Dok ume n		8 Dok ume n		8 Dok ume n		Sub ag Pere kon omi an Setd a Kab upat en Sido arjo	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksana nya kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam dan ESDM	1. Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang SDA	Hasil Survey kualita s kebijak an daerah di bidang SDA	NA	NA	6.731 .790. 000,0 0	70	6.911 .745. 465,0 0	72	#REF !	75	#REF !	77	#REF !	80	#REF !	80	#REF !	Bagi an Pere kon omi an dan SDA Setd a		

																				Kab upat en Sido arjo	
			2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	DO : (Jumla h OPD di bidang SDA denga n Nilai SAKIP minim al A / Jumla h seluru h OPD di bidang SDA) x 100%	NA	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %		100 %	-	100 %	-	Bagi an Pere kon omi an dan SDA Setd a Kab upat en Sido arjo	
			3. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian,	DO : (Jumla h urusan di bidang	NA	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %		100 %	-	100 %	-	Bagi an Pere kon omi an	

				Dinas Perikanan)	SDA dengan target kinerja tercapai / Jumlah urusan yang diampu bidang SDA) x 100%																dan SDA Setda Kabupaten Sidoarjo			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tersusunnya dokumen kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan			Jumlah rumusan kebijakan Ketahanan Pangan bidang Pertanian dan Perikanan yang disusun	Jumlah dokumen kebijakan yang disusun	Jumlah dokumen kebijakan	1 laporan	1 laporan	Rp 6.665.305.000	1 laporan	6.585.800.000,00		81.372.915,00		153.800.000,00		153.800.000,00		153.800.000,00		153.800.000,00	Subag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo	

[illegible]

			Terealisasi nya BLT kepada buruh pabrik rokok			Persentas e buruh pabrik rokok yang menerima BLT	DO : (Buruh Pabrik Rokok yang meneri ma BLT / Jumla h Usulan Peneri ma BLT) x 100%	NA	80%		100 %										Sub ag SDA Setd a Kab upat en Sido arjo		
			Terlaksan anya Koordinasi , Sinkronisa si, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutana n, Kelautan dan Perikanan , Perdagang an, Perindustr			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutana n, Kelautan dan Perikanan ,		NA	NA		NA		2 Dok ume n		2 Dok ume n		2 Dok ume n		2 Dok ume n		2 Dok ume n	Sub ag SDA Setd a Kab upat en Sido arjo	

			ian, KUKM, Penanam an Modal, Tenaga Kerja		Perdagan, Perindustr ian, KUKM, Penanam an Modal, Tenaga Kerja																	
		Koordinasi , Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambahan dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya a dokumen kebijakan bidang Pertambahan dan Lingkungan Hidup		Jumlah rumusan kebijakan bidang Pertambahan dan Lingkungan Hidup yang disusun	Jumlah dokumen kebijakan yang disusun	NA	NA	Rp -	1 laporan	Rp 16.40 0.000	Rp 50.00 0.000		Rp 16.40 0.000		Rp 16.40 0.000		Rp 16.40 0.000		Rp 16.40 0.000		Sub ag SDA Setda Kab upat en Sido arjo

			Terlaksananya koordinasi bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil koordinasi yang dilaksanakan Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi yang disusun dalam satu tahun	NA	NA		1 laporan												Sub ag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Terlaksananya kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Persentase kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang	Persentase kebijakan yang dilaksanakan (Jumlah	NA	NA		100 %												Sub ag SDA Setda Kabupaten	

					dilaksanakan	h kebijakan yang dilaksanakan / Jumlah kebijakan yang disusun) x 100%															Sidoarjo	
					Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas LHK)	(Jumlah PD dengan nilai SAKIP A / Jumlah PD) x 100% PD : Dinas LHK	NA	100 %		100 %											Subag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo	
					Persentase kinerja urusan tercapai di bidang	DO : (Jumlah urusan dengan	NA	100 %		100 %											Subag SDA Setda	

					SDA (Dinas LHK)	n target kinerja tercap ai / Jumla h urusan) x 100% PD : Dinas LHK															Kab upat en Sido arjo	
					Terlaksan anya Koordinasi , Sinkronisa si, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertamba ngan dan Sumber Daya Mineral, Lingkunga n Hidup, Kominfo, Perhubun gan, Statistik, Persandia n	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertamba ngan dan Sumber Daya Mineral, Lingkunga n Hidup, Kominfo, Perhubun gan,	NA	NA		NA	1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		Sub ag SDA Setda Kab upat en Sido arjo	

					Statistik, Persandia n																			
		Koordinasi , Sinkronisa si dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersusunnya dokumen kebijakan bidang Energi dan Air		Jumlah rumusan kebijakan bidang Energi dan Air yang disusun	Jumlah dokumen kebijakan yang disusun	Jumlah dokumen kebijakan yang disusun dalam satu tahun	1 laporan	1 laporan	Rp 66.48 5.000	1 laporan	309.5 45.46 5,00		309.5 45.46 5,00		309.5 45.46 5,00		309.5 45.46 5,00		309.5 45.46 5,00		309.5 45.46 5,00	Sub ag SDA Setda Kab upaten Sido arjo	

					h kebijakan yang dilaksanakan / Jumlah kebijakan yang disusun) x 100%															Sidoarjo	
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan	NA	NA		NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						Subag SDA Setda Kabupaten Sidoarjo	

			Permukiman, Pertanahan		n Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan																	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Optimalisasi kualitas penyusunan kebijakan bidang administrasi dan pengendalian pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan bidang pembangunan	Hasil Survey kualitas kebijakan daerah di bidang pembangunan	NA	NA	Rp 233.9 62.00 0,00	70	Rp 323.1 12.00 0,00	72	Rp 1.200 .000. 000,0 0	75	Rp 1.250 .000. 000,0 0	77	Rp 1.300 .000. 000,0 0	80	Rp 1.400 .000. 000,0 0	80	Rp 1.400 .000. 000,0 0	Kep ala Bagi an Pem ban gun an Setd a Kab upat en Sido arjo		
		Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang	1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pembangunan (Dinas PUBMSDA,	DO : (Jumlah OPD di bidang pembangunan	25%	25%	Rp -	40%	Rp -	40%	Rp -	80%	Rp -	80%	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	Kep ala Bagi an Pem ban gun an		

		pembangunan	Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)	dengan Nilai SAKIP minimal A / Jumlah seluruh OPD di bidang pembangunan) x 100%																Setda Kabupaten Sidoarjo	
			2. Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)	DO : (Jumlah urusan di bidang pembangunan dengan target kinerja tercapai / Jumlah urusan	100 %	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo	

				yang diampu bidang pembangunan) x 100%																	
			3. Nilai Perencanaan dan Penganggaran (Area Intervensi MCP)	DO: Hasil penilaian Area Intervensi MCP Formula: Hasil penilaian masing-masing area intervensi x bobot / jumlah area intervensi Hasil				82	82,5	83	83,5	84	84							Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo	

				penilai an dari KPK- RI																	
		Meningkatn ya kualitas penyusuna n dan pelaksanaa n Program Perangkat Daerah	1. Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan standarisasi (SSH, ASB, HSPK)	(jumla h progra m yang SRO nya disusu n sesuai standa risasi / jumlah seluru h progra m) x 100% DO : Stand arisasi yaitu keses uaian denga n	100 %	100 %	Rp 200.0 00.00 0,00	100 %	Rp 200.0 00.00 0,00	100 %	Rp 200.0 00.00 0,00	100 %	Rp 200.0 00.00 0,00	100 %	Rp 200.0 00.00 0,00	100 %	Rp 200.0 00.00 0,00	100 %	Rp 200.0 00.00 0,00	Kep ala Bagi an Pem ban gun an Setd a Kab upat en Sido arjo	

				SSH, ASB, dan HSPK																	
			2. Persentase Permasalahan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	(jumlah permasalahan pembangunan daerah yang telah ditindaklanjuti / jumlah seluruh laporan aduan permasalahan pembangunan yang	100 %	100 %	Rp 226.4 87.60 0,00	100 %	Rp 232.4 87.60 0,00	100 %	Rp 800.0 00.00 0,00	100 %	Rp 850.0 00.00 0,00	100 %	Rp 900.0 00.00 0,00	100 %	Rp 1.000 .000. 000,0 0	100 %	Rp 1.000 .000. 000,0 0	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo	

				dilapor kan resmi melalu i Pemka b) x 100%																	
			3. Persentase Program Perangkat Daerah Yang Dilaksana n Sesuai Dengan Target	(jumla h progra m yang dilaksa nakan sesuai target / jumlah seluru h progra m) x 100% DO : Progra m yang dilaksa nakan sesuai target maksu dnya	81,2 5%	100 %	Rp 464.3 37.04 5,00	85%	Rp 701.6 77.14 0,00	87,5 0%	Rp 2.200 .000. 000,0 0	90%	Rp 2.250 .000. 000,0 0	92,5 0%	Rp 2.300 .000. 000,0 0	95%	Rp 2.400 .000. 000,0 0	95%	Rp 2.400 .000. 000,0 0	Kep ala Bagi an Pem ban gun an Setd a Kab upat en Sido arjo	

					adalah yang mencapai realisasi minimal 90%																	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tersusunnya kebijakan terkait standarisasi penyusunan program dan kegiatan PD		Jumlah kebijakan standarisasi penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang disusun (SSH, ASB, HSPK)	Jumlah kebijakan standarisasi penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang disusun DO : kebijakan berupa SSH, ASB, HSPK	1 Kebijakan	2 Kebijakan	Rp 433.962.000	3 Kebijakan	Rp 523.112.000,00		Rp 1.400.000.000,00		Rp 1.450.000.000,00		Rp 1.500.000.000,00		Rp 1.600.000.000,00		Rp 1.600.000.000,00	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Setda Kabupaten Sidoarjo	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																						Sidoarjo	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tersusunnya kebijakan terkait pengendalian pembangunan		Persentase rumusan kebijakan pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah Rumusan Kebijakan pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi produk hukum / Jumlah rumusan kebijakan pengendalian	100 %	100 %	Rp 226.487.600	100 %	Rp 232.487.600,00		Rp 800.000.000,00		Rp 850.000.000,00		Rp 900.000.000,00		Rp 1.000.000.000,00		Rp 1.000.000.000,00	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Setda Kabupaten Sidoarjo	

[illegible]

						penyel esaian nya / jumlah seluru h lapora n perma salaha n pelaks anaan progra m dan kegiat an yang dilapor kan secara resmi melalu i Pemka b) x 100%																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		NA	NA		NA		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah		Jumlah dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah yang disusun (LKPJ dan Laporan Berkala	Jumlah dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah yang disusun,	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 464.337.045	5 Dokumen	Rp 701.677.140,00		Rp 2.200.000.000,00		Rp 2.250.000.000,00		Rp 2.300.000.000,00		Rp 2.400.000.000,00		Rp 2.400.000.000,00		Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Setda Kabupaten	

					TW1 - TW4)	yang meliputi : Dokumen LKPJ dan Dokumen Laporan Berkala Triwulan															en Sidoarjo	
			Terevaluasi nya hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan PD sesuai dengan target		Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi >= 90% (diatas 90%)	(jumlah PD yang nilai realisasi penyerapan anggarannya diatas 90% / jumlah seluruh PD) x 100% DO :	81,25%	100%		85%											Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Setda Kabupaten Sidoarjo	

					produk berupa Raport PD Triwul anan																		
			Terlaksan anya Pengelola an Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana an Pembang unan		Jumlah Laporan Hasil Pengelola an Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana an Pembang unan	NA	NA		NA	5 Lap oran		5 Lap oran		5 Lap oran		5 Lap oran		5 Lap oran		5 Lap oran		Kep ala Sub Bagi an Eval uasi dan Pela pora n Setd a Kab upat en Sido arjo	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainy a indeks kualitas PBJ		Indeks Kualitas PBJ	DO: Hasil Penilai an dari LKPP	leve l 3 pad a 8 vari abel	leve l 4 pad a 1 vari abel	Rp 3.876 .146. 879	leve l 4 pad a 3 vari abel	Rp 6.343 .652. 526		Rp 6.978 .017. 779		Rp 7.675 .819. 556		Rp 8.443 .401. 512		Rp 9.287 .741. 663		Rp 9.287 .741. 663		Bagi an PBJ Setd a Kab upat en	

																				Sidoarjo		
				Nilai Pengadaan Barang dan Jasa (Area Intervensi MCP)	DO: Hasil penilaian Area Intervensi MCP Formula: Hasil penilaian masing-masing area intervensi x bobot / jumlah area intervensi Hasil penilaian dari KPK-RI				85		85,5		86		86,5		87		87		Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo	

		Tercapainya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		NA	NA		NA		60		71		73		75		75		Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terfasilitasinya seluruh pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui bagian pengadaan barang/jasa	1. Jumlah produk hukum bidang pengadaan barang/jasa yang dirumuskan	DO : Seluruh produk hukum berupa surat edaran, peraturan bupati, SOP, perda, dll bidang pengadaan barang dan jasa yang dirumuskan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	Rp 570.753.242	4 Kebijakan	Rp 3.585.448.960		Rp 3.943.993.856		Rp 4.338.393.242		Rp 4.772.232.566		Rp 5.249.455.822		Rp 5.249.455.822	Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo	

					skan Formul asi : Jumla h seluru h produk hukum bidang Penga daan barang /jasa yang dirumu skan																		
				2. Persentas e jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatan gani pada kuartal pertama	DO : Nilai kontra k besar sesuai peratu ran perund ang- undan gan yang berlak u Formul	NA	100 %		100 %													Bagi an PBJ Setd a Kab upat en Sido arjo	

							asi : Jumla h kontra k infrastr uktur denga n nilai besar yang perlu pemba nguna n dalam tiga kuartal yang ditand atanga ni pada kuartal pertam a tahun N / Jumla h kontra k besar																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							h pagu penga daan yang dilakuk an denga n metod e kompe titif / Jumla h pagu penga daan yang dilakuk an denga n metod e non kompe titif x 100%																
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					4. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Formula : [Jumlah pagu belanja langsung (belanja barang dan jasa serta belanja modal) yang melalui pengadaan + Efisiensi hasil pengadaan] / [Total belanja langsung (belanja	88,30%	100%	100%												Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo	
--	--	--	--	--	---	---	--------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

						penga daan dan keperl uan penca ntuma n produk katalo g elektro nik lokal Formul asi : Jumla h seluru h riset dan analisis a pasar barang /jasa yang dilaksa nakan																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					7. Jumlah laporan dokumen pengadaaan strategis	DO : Paket strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda Formulasi : Jumlah paket strategis yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang/Jasa	10 Paket	10 Paket		10 Paket												Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo	
--	--	--	--	--	--	---	----------	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

					8. Prosentase Paket Tender yang dilaksanakan sesuai dengan pengajuan dari OPD	DO : Paket tender yang diajukan ke bagian PBJ. Formulasi : Jumlah Paket Tender yang dilaksanakan oleh bagian pengadaan barang/jasa / Jumlah seluruh paket tender yang diajukan dari	100 %	100 %		100 %											Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo	
--	--	--	--	--	---	---	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

							i Katalo g Elektro nik Lokal / Jumla h seluru h produk Katalo g Elektro nik Lokal yang diusulk an dari OPD x 100%																
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					10. Presentas e paket Tender yang dilakukan pendampi ngan perencanaan dan pengelola an kontrak sesuai dengan permintaa n dari OPD	DO : Penda mping an dalam proses perenc anaan s.d. pengel olaan kontra k paket penga daan barang /jasa yang dilaksa nakan berdas arkan usulan dari OPD. Formul asi : Jumla h paket Tende r yang	100 %	100 %														Bagi an PBJ Setd a Kab upat en Sido arjo	
--	--	--	--	--	---	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						dilakukan pendampingan perencanaan dan pengelolaan kontrak / Jumlah seluruh paket Tender yang diminta oleh OPD untuk dilakukan pendampingan perencanaan dan pengelolaan																	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				n Barang dan Jasa																upat en Sidoarjo	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terfasilitasi nya seluruh pengguna LPSE		1. Persentase ketersediaan layanan LPSE secara online	DO : Ketersediaan jaringan internet untuk seluruh aplikasi yang dikelola oleh Bagian PBJ Formulasi : Ketersediaan jaringan internet untuk layanan pengadaan barang	90%	90%	Rp 1.158.948.419	91%	Rp 1.351.054.420	Rp 1.486.159.862	Rp 1.634.775.848	Rp 1.798.253.433	Rp 1.978.078.776	Rp 1.978.078.776					Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo	

						elektro nik yang dilaksa nakan / jumlah seluru h pelaya nan dan registr asi penga daan barang /jasa pemer intah secara elektro nik yang diajuk an oleh pelaku penga daan																
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Terkelolan ya Layanan Pengadaa n Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaa n Secara Elektronik	NA	NA		NA		4 Dok ume n		4 Dok ume n		4 Dok ume n		4 Dok ume n		4 Dok ume n		Bagi an PBJ Setd a Kab upat en Sido arjo	
	Pembinaa n dan Advokasi Pengadaa n Barang dan Jasa	Meningkatn ya kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jas a di Kabupaten Sidoarjo		Jumlah para pelaku pengadaa n barang/jas a atau personil lainnya yang dibina	DO : Pembi naan (bimte k, sosiali sasi dan pelatih an) yang dilakuk an kepad a pelaku penga dan barang /jasa (PA, KPA, Pokja,	300 Ora ng	300 Ora ng	Rp 2.146 .445. 218	600 Ora ng	Rp 1.407 .149. 146		Rp 1.547 .864. 061		Rp 1.702 .650. 467		Rp 1.872 .915. 513		Rp 2.060 .207. 065		Rp 2.060 .207. 065	Bagi an PBJ Setd a Kab upat en Sido arjo	

						PPKo m, PP, Penyel enggar a Swake lola, Penye dia) Formul asi : Jumla h pelaku penga daan barang /jasa atau person il lainny a yang mengi kuti kegiat an pemb inaan (bimbi ngan teknis, sosiali																
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						ngan teknis, sosiali sasi, pelatih an) yang narasu mbern ya berasa l dari person el bagian penga daan barang dan jasa																	
			Pelaksanaa n proses pengadaan barang/jasa 100% dilaksanaka n secara elektronik		Jumlah Jabatan fungsional Pengelola Pengadaa n Baran g/Ja sa (JFPPBJ) yang dibina.	DO dan Formul asi : Jumla h Pengel ola Penga daan Baran g/Jasa di	3 Ora ng	3 Ora ng		8 Ora ng												Bagi an PBJ Setd a Kab upat en Sido arjo	

						Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mengikuti pembinaan internal (mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan yang dilaksanakan oleh bagian pbj) dan mengikuti pembinaan ekster																	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					yang diproses	berdas arkan permin taan dari OPD/i nstans i lain Formul asi : Jumla h penda mping an dan atau konsul tasi Proses Penga daan Baran g dan Jasa yang dipros es / jumlah seluru h permin taan penda																
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						dirumuskan oleh bagian PBJ dan ditetapkan pada tahun selanjutnya Formulasi : jumlah kebijakan daerah bidang pengendalian barang/jasa yang dilakukan evaluasi / jumlah seluruh kebijakan																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						dilaksana nakan melalu i aplikas i penga daan secara elektro nik (SPSE , Katalo g, Toko Daring) Formul asi : Jumla h paket penga daan yang dilaksa nakan melalu i aplikas i penga															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						yang dirumuskan oleh bagian PBJ dan ditetapkan																
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		NA	NA		NA	400 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang		Bagian PBJ Setda Kabupaten Sidoarjo	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Meningkatnya kualitas kebijakan dan koordinasi dibawah koordinasi Asisten Administrasi Umum		Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Survey kualitas kebijakan daerah yang diimplementasikan di bidang Urusa	NA	NA	Rp 59.44 7.871 .793	70	Rp 56.96 6.673 .573	72	Rp 92.21 4.804 .992	75	Rp 97.94 2.300 .492	77	Rp 106.5 34.39 5.540	80	Rp 116.1 41.08 5.095	80	Rp 137.2 59.06 3.604	Asisten Administrasi Umum	

			n Pemer intaha n Daera h																	
		Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	DO : Perse ntase PD denga n Nilai SAKIP minim al A Formul a : (Jumla h OPD denga n Nilai SAKIP minim al A / Jumla h seluru h OPD) x 100% #Bagia n	66%	66%	Rp 286.7 68.10 0	66%	Rp 397.5 50.00 0	66%	Rp 700.0 00.00 0	100 %	Rp 800.0 00.00 0	100 %	Rp 900.0 00.00 0	100 %	Rp 1.000 .000. 000	100 %	Rp 4.000 .000. 000	Asis ten Adm inistr asi Umu m	

			Organi sasi																	
		Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	DO : (Jumla h OPD denga n Nilai SAKIP minim al A / Jumla h seluru h OPD) x 100% #Bagia n Organi sasi	20%	50%	Rp 190.9 81.46 0	75%	Rp 104.6 75.00 0	77%	Rp 225.0 00.00 0	78%	Rp 250.0 00.00 0	80%	Rp 275.0 00.00 0	100 %	Rp 300.0 00.00 0	100 %	Rp 1.350 .000. 000	Asis ten Adm inistr asi Umu m	
Penataan Organisasi	Meningkatn ya kualitas kebijakan daerah di bidang organisasi	Indeks kualitas kebijakaan daerah bidang Organisasi	Hasil Survey kualita s kebijak an	NA	NA	Rp 583.2 88.10 0	70	Rp 1.136. 050.0 00	72	Rp 1.875. 000.0 00	75	Rp 2.100. 000.0 00	77	Rp 2.320. 000.0 00	80	Rp 2.550. 000.0 00	80	Rp 10.49 5.000. 000	Bagi an Orga nisa si Setd a	

			PD : Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusars ip	daerah di bidang Organi sasi																Kab upat en Sido arjo	
		Meningkatn ya kualitas koordinasi di bidang organisasi	1. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang organisasi (Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusars ip)	DO : (Jumla h OPD di bidang organi sasi denga n Nilai SAKIP minim al A / Jumla h seluru h OPD di bidang organi sasi) x 100%	25%	25%	Rp 190.9 81.46 0	25%	Rp 104.6 75.00 0	50%	Rp 225.0 00.00 0	50%	Rp 250.0 00.00 0	75%	Rp 275.0 00.00 0	100 %	Rp 300.0 00.00 0	100 %	Rp 1.350. 000.0 00	Bagi an Orga nisa si Setd a Kab upat en Sido arjo	
			2. Persentase kinerja urusan yang tercapai di bidang	DO : (Jumla h urusan di bidang	100 %	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %		Bagi an Orga nisa si Setd	

			organisasi (Setda, Inspektorat, BKD, Disperpusar sip)	organisasi dengan target kinerja tercapai / Jumlah urusan yang diampu bidang organisasi) x 100%																a Kabupaten Sidoarjo	
			3. Persentase IPP Perangkat Daerah Role Model dengan Kategori Pelayanan Sangat Baik (A-)	DO : Persentase PD dengan Nilai SAKIP minimal A Formula : (Jumlah OPD dengan Nilai				66%		66%		100%		100%		100%		100%		Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	

				SAKIP minim al A / Jumla h seluru h OPD) x 100% #Bagia n Organi sasi																	
			4. Nilai Pengawasan APIP (Area Intervensi MCP)	DO: Hasil penilai an Area Interve nsi MCP Formul a: Hasil penilai an masin g- masin g area interve nsi x				95		95,5		96		96,5		97		97		Bagi an Orga nisa si Setd a Kab upat en Sido arjo	

		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	1. Persentase unit kerja yang pelayanan publik yang prima	Jumlah PD yang pelayanan publik berkategori prima : Jumlah PD x 100%	NA	NA		NA		10%		14%		20%		31%		31%		Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	
			2. Persentase Unit Kerja yang tingkat kepatuhan berkategori Zona Hijau	Jumlah UPP Zona Hijau : Jumlah UPP yang disampling x 100%	NA	NA		NA		70%		85%		85%		85%		85%		Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	
		Meningkatnya kualitas SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Persentase PD yang nilai PMPRB berkategori B	Jumlah PD yang nilai PMPRB berkategori B dibagi	21%	NA	Rp 224.640.480	40%	Rp 543.461.600	55%	Rp 600.000.000	70%	Rp 625.000.000	85%	Rp 650.000.000	100%	Rp 700.000.000	100%	Rp 3.155.000.000	Bagian Organisasi Setda Kabupaten	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					ditindaklanjuti hasil evaluasinya	telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya dibagi seluruh Unit kerja yang dievaluasi Anjab-ABKnya x 100%															en Sidoarjo	
			Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		NA	NA		NA	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen						Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan bidang		1. Persentase PD yang menerapkan peta	Jumlah PD yang menerapkan	NA	NA	Rp 150.645.000	30%	Rp 465.350.000		Rp 700.000.000		Rp 800.000.000		Rp 900.000.000		Rp 1.000.000.000		Rp 4.000.000.000	Bagian Organisasi	

			ketatalaksa naan		proses bisnis	peta proses bisnis dibagi seluru h PD x 100%															Setd a Kab upat en Sido arjo	
					2. Prosentas e Unit Kerja yang berinovasi dalam peningkat an kualitas pelayanan publik	Jumlah Unit Kerja yang berinov asi di bagi seluruh Unit Kerja yang dimone v X100% DO : Berinov asi adalah PD yang menum buhkan inovasi dan berkela njutan	78%	NA		80%											Bagi an Orga nisa si Setd a Kab upat en Sido arjo	

			Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		NA	NA		NA			2 Laporan			2 Laporan			2 Laporan			2 Laporan			Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo					
		Monitoring Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan pelayanan publik			1. Persentase unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima	Jumlah unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima dibagi seluruh unit kerja yang dimonev x 100%	14%	NA		Rp 286.768.100	20%		Rp 397.550.000			Rp 700.000.000			Rp 800.000.000			Rp 900.000.000			Rp 1.000.000.000			Rp 4.000.000.000	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	
						2. Tingkat Kepatuhan Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja	19%	NA			30%														Bagian Orga					

					Kerja dalam Pelayanan Publik berkategori Zona Hijau	yang tingkat kepatuhan berkategori Zona Hijau dibagi seluruh Unit Kerja yang dimonitor x 100%														nisa si Setda Kabupaten Sidoarjo			
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		NA	NA		NA	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo		
		Peningkatan Kinerja dan	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan		1. Persentase PD yang nilai	Jumlah PD yang nilai	NA	NA	Rp 224.640.480	30%	Rp 543.461.600		Rp 600.000.000		Rp 625.000.000		Rp 650.0		Rp 700.000.000		Rp 3.155.000.000	Bagian Organisasi	

		Reformasi Birokrasi	Kinerja dan Reformasi Birokrasi		PMPRB berkatagori baik	PMPRB berkatagori baik dibagi seluruh PD x 100%											00.000						si Setda Kabupaten Sidoarjo	
					2. Presentasi PD yang nilai SAKIP berkatagori Memuaskan (A)	Jumlah PD yang nilai SAKIP berkatagori Memuaskan (A) dibagi seluruh PD x 100%	BB (78, 23)	BB (78, 38)		A (80, 5)													Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	
					3. Persentase Unit Kerja yang menerapkan Budaya Kinerja	Jumlah Unit Kerja yang menerapkan Budaya Kinerja dibagi	100 %	NA		100 %													Bagian Organisasi Setda Kabupaten	

						seluruh Unit Kerja yang dimonitor x 100%															Sidoarjo		
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				NA	NA		NA		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen			Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas laporan kinerja Perangkat Daerah			Persentase PD yang telah melaporkan kinerjanya sesuai dengan Juknis dan tepat waktu	Jumlah PD yang telah melaporkan kinerjanya sesuai dengan Juknis dan tepat waktu	80%	100%	Rp 190.981.460	90%	Rp 104.675.000	Rp 225.000.000		Rp 250.000.000		Rp 275.000.000		Rp 300.000.000		Rp 1.350.000.000	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	

			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		NA	NA		NA		146 Dokumen		146 Dokumen		146 Dokumen		146 Dokumen		146 Dokumen		Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya tahapan perencanaan		Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	5 Tahapan	5 Tahapan	Rp 55.600.000	5 Tahapan	Rp 3.256.000	5 Tahapan	Rp 8.600.000	5 Tahapan	Rp 10.700.000	5 Tahapan	Rp 12.800.000	5 Tahapan	Rp 65.400.000	5 Tahapan	Rp 76.930.000		Bagian Umum dan Perencanaan dan Keuangan Setda	

																				Kab upat en Sido arjo	
		Terlaksana nya rekomenda si hasil evaluasi kinerja	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Rp 1.050 .000	1 Rekomendasi	Rp 51.08 9.000	1 Rekomendasi	Rp 2.250 .000	1 Rekomendasi	Rp 2.800 .000	1 Rekomendasi	Rp 3.350 .000	1 Rekomendasi	Rp 3.900 .000	1 Rekomendasi		Bagian Umum dan Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	
		Terlaksana nya tahapan perencanaan	Indeks Kualitas Kebijakan (BPKAD, BPPD)	Hasil Survey kualitas kebijakan daerah di				70		72		75		77		80		80		Bagian Umum dan Perencanaan	

					bidang Perencanaan dan Keuangan																	n dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	
				Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A (BPKAD, BPPD)	DO: Persentase PD dengan Nilai SAKIP minimal A Formula : (Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP minimal A / Jumlah seluruh				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			Bagian Umum dan Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	

					h OPD) x 100% (BPKA D, BPPD) #Bagia n Organi sasi																
				Persentase kinerja urusan tercapai (BPKAD, BPPD)	DO: Perse ntase kinerja urusan tercap ai Formul a : (Jumla h urusan denga n target kinerja tercap ai / Jumla h urusan yang				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Bagi an Umu m dan Pere nca naa n dan Keu ang an Setd a Kab upat en Sido arjo

					dilaksanakan Pemda) x 100% (BPKAD, BPPD)																
				Nilai Optimalisasi Pajak Daerah (Area Intervensi MCP)	DO: Hasil penilaian Area Intervensi MCP Formula: Hasil penilaian masing-masing area intervensi x bobot / jumlah area intervensi				88	88,5	89	89,5	90	90					Bagian Umum dan Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo		

				Nilai Manajemen Aset Daerah (Area Intervensi MCP)	DO: Hasil penilaian Area Intervensi MCP Formula: Hasil penilaian masing-masing area intervensi x bobot / jumlah area intervensi				68		69		69,5		70		70,5		70,5		Bagian Umum dan Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	
				Nilai SAKIP PD	Formula: Jumlah nilai SAKIP masing-masing				84		84,5		84,7		85		85,5		85,5		Bagian Umum dan Perencanaan	

					komponen dan nilai SPIP x bobot / jumlah komponen nilai SAKIP dan nilai SPIP yang dinilai DO: Nilai SAKIP Sekretariat Daerah berdasarkan hasil penilaian Tim SAKIP Kabupaten																dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

				Nilai RB	Formula: Jumlah penilaian komponen pengikut dan komponen hasil DO: Hasil penilaian mandiri terhadap RB Sekretariat Daerah yang dilakukan oleh Tim RB Kabupaten				34,48 (95%)		34,85 (96%)		35,21 (97%)		35,57 (98%)		36,3 (100%)		36,3 (100%)		Bagian Umum dan Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	---	--

						ariat Daerah yang dilakukan oleh Tim IPP Kabupaten																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen PD		Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	2 dokumen	8 dokumen	Rp 52.000.000	2 dokumen	Rp 550.000		Rp 3.000.000		Rp 3.500.000		Rp 4.000.000		Rp 55.000.000		Rp 60.600.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		NA	NA		NA		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		Bagian Perencanaan	

			Tersedian ya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen RKA- SKPD		NA	NA		NA		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		Bagi an Pere nca naa n dan Keu ang an Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Koordinasi dan Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA			Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dok ume n	1 Dok ume n	Rp 450.0 00	1 Dok ume n	Rp 198.0 00		Rp 600.0 00		Rp 700.0 00		Rp 800.0 00		Rp 900.0 00		Rp 1.090 .000		Bagi an Pere nca naa n dan Keu ang an Setd a Kab upat en		

																						Sido arjo						
			Tersedian ya Dokumen Perubaha n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubaha n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA- SKPD		NA	NA		NA		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		Bagi an Pere nca naa n dan Keu ang an Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Koordinasi dan Penyusun an DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen DPA			Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun	Jumla h dokum en DPA- SKPD yang disusu n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	Rp 900.0 00	1 Dok ume n	Rp 1.089 .000		Rp 1.500 .000		Rp 2.000 .000		Rp 2.500 .000		Rp 3.000 .000		Rp 3.400 .000		Bagi an Pere nca naa n dan Keu ang an Setd a				

																						Kab upat en Sido arjo			
			Tersedian ya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Dokumen DPA- SKPD		NA	NA		NA		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		1 Dok ume n		Bagi an Pere nca naa n dan Keu ang an Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Koordinasi dan Penyusun an Perubaha n DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA		Jumlah dokumen Perubaha n DPA- SKPD yang disusun	Jumla h dokum en Perub ahan DPA- SKPD yang disusu n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	Rp 900.0 00	1 Dok ume n	Rp 1.089 .000		Rp 1.500 .000		Rp 2.000 .000		Rp 2.500 .000		Rp 3.000 .000		Rp 3.400 .000		Bagi an Pere nca naa n dan Keu ang an Setd		

		Kinerja SKPD				disusun																Setda Kabupaten Sidoarjo	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		NA	NA		NA	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan			Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Monev		Jumlah dokumen monev PD yang disusun	Jumlah dokumen monev PD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 150.000	4 Dokumen	Rp 165.000		Rp 250.000		Rp 300.000		Rp 350.000		Rp 400.000		Rp 540.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		NA	NA	NA	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan			Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten		

																					Sidoarjo	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terealisasi nya anggaran PD		Persentase realisasi anggaran PD	Perse ntase realisa si anggar an PD	80%	80%	Rp 25.20 6.461 .327	85%	Rp 26.20 4.509 .595	87%	Rp 33.25 7.500 .000	89%	Rp 36.60 8.300 .000	90%	Rp 40.30 9.200 .000	92%	Rp 44.36 0.200 .000	92%	Rp 48.79 6.420 .000	Bagi an Pere nca naa n dan Keu ang an Setd a Kab upat en Sido arjo	
	Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediany a Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedian ya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersed ianya Gaji dan Tunjan gan ASN	12 Bula n	12 Bula n	Rp 25.20 0.335 .139	12 Bula n	Rp 26.20 2.265 .595		Rp 33.25 0.000 .000		Rp 36.60 0.000 .000		Rp 40.30 0.000 .000		Rp 44.35 0.000 .000		Rp 48.78 5.100 .000	Bagi an Pere nca naa n dan Keu ang an	

																						Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Tersedian ya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		NA	NA		NA		165 Ora ng/ bula n		165 Ora ng/ bula n		165 Ora ng/ bula n		165 Ora ng/ bula n		165 Ora ng/ bula n		Bagi an Pere nca naa n dan Keu ang an Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Pelaksana an Penataus ahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksana nya Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penataus ahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumla h Doku men Penat ausah aan dan Pengui	NA	NA	Rp -	NA	Rp -	NA	Rp -	12 Dok ume n	Rp 1.060 .080. 000	12 Dok ume n	Rp 1.060 .080. 000	12 Dok ume n	Rp 1.060 .080. 000	12 Dok ume n	Rp 1.060 .080. 000	Bagi an Pere nca naa n dan Keu ang	

					ian/Verifikasi Keuangan SKPD																an Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun		Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	14 Dokumen	14 Dokumen	Rp 6.126.188	14 Dokumen	Rp 2.244.000		Rp 7.500.000		Rp 8.300.000		Rp 9.200.000		Rp 10.200.000		Rp 11.320.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	

		Tersedian ya Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semester an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semester an SKPD		NA	NA		NA		17 Lap oran		17 Lap oran		17 Lap oran		17 Lap oran		17 Lap oran		Bagi an Pere nca naa n dan Keu ang an Setd a Kab upat en Sido arjo	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Kategori Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kateg ori Survey Kepua san Masya rakat (SKM)	75	80	Rp 2.468 .248. 524	San gat Baik	Rp 2.494 .625. 858	San gat Baik	Rp 3.166 .300. 001	San gat Baik	Rp 3.487 .150. 001	San gat Baik	Rp 3.837 .449. 999	San gat Baik	Rp 4.222 .950. 001	San gat Baik	Rp 4.646 .145. 001	Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen listrik		Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	19 Jenis	19 Jenis		16 Jenis												Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		NA	NA	Rp 112.759.691	NA	Rp 48.998.950	4 Paket	Rp 138.000.000	4 Paket	Rp 152.000.000	4 Paket	Rp 167.500.000	4 Paket	Rp 184.500.000	4 Paket	Rp 203.050.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang	97 Jenis	97 Jenis	Rp 300.421.636	73 Jenis	Rp 258.341.222		Rp 385.000.000		Rp 424.000.000		Rp 466.500.000		Rp 514.000.000		Rp 565.500.001	Bagian Umum Setda Kabupaten	

						tersedi a															en Sido arjo				
			Tersedian ya Peralatan dan Perlengka pan Kantor				NA	NA		NA		15 Pak et		15 Pak et		15 Pak et		15 Pak et		15 Pak et		Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo			
		Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	Tersedian ya peralatan rumah tangga		Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis peralat an rumah tangga yang tersedi a	16 Jeni s	16 Jeni s		Rp 61.26 5.494	7 Jeni s		Rp 423.1 40.85 0		Rp 27.10 0.000		Rp 29.85 0.000		Rp 32.85 0.000		Rp 36.20 0.000		Rp 39.92 0.001	Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Tersedian ya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang		NA	NA		NA		4 Pak et		4 Pak et		4 Pak et		4 Pak et		4 Pak et		4 Pak et		Bagi an Umu m Setd a	

				Disediak an																	Kab upat en Sido arjo	
	Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	Tersediany a BBM		1. Jumlah BBM yang disediaka n 2. Jenis logistik rumah tangga kantor yang tersedia	1. Jumla h BBM yang disedi akan 2. Jenis logistik rumah tangga kantor yang tersedi a	1. 200 0 Liter 2. 2 Jeni s	1. 200 0 Liter 2. 2 Jeni s	Rp 712.2 33.52 8	1. 200 0 Liter 2. 2 Jeni s	Rp 750.0 00.00 0		Rp 685.0 00.00 0		Rp 755.0 00.00 0		Rp 831.0 00.00 0		Rp 914.2 00.00 0		Rp 1.005 .719. 999	Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Tersedian ya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediak an		NA	NA	NA		4 Pak et		4 Pak et		4 Pak et		4 Pak et		4 Pak et			Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya cetak dan penggandaan		Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	Rp 5.900.000	2 Jenis	Rp 3.190.000		Rp 7.500.000		Rp 8.500.000		Rp 9.500.000		Rp 10.500.000		Rp 11.650.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		NA	NA		NA		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket						Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya buku bacaan peraturan perundang-undangan dan koran		Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	11 Jenis	11 Jenis	Rp 108.105.544	11 Jenis	Rp 90.259.400		Rp 135.000.000		Rp 150.000.000		Rp 165.100.000		Rp 181.700.000		Rp 199.970.001	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	

					yang Disediakan																	Setda Kabupaten Sidoarjo	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan makanan		a. Jenis jamuan yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	a. Jenis jamuan yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	a. 3 Jenis b. 200 0 Pax	a. 3 Jenis b. 200 0 Pax	Rp 353.4 62.50 0	a. 3 Jenis b. 200 0 Pax	Rp 275.0 00.00 0		Rp 427.8 00.00 0		Rp 470.6 00.00 0		Rp 517.7 00.00 0		Rp 569.5 00.00 0		Rp 626.5 50.00 0	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		NA	NA		NA		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		Bagian Umum Setda Kabupaten	en

																						Sidoarjo	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya SPT yang dirindaklanjuti		a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	a. Perseentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	a. 100 % b. 1 Tahun	a. 100 % b. 1 Tahun	Rp 447.919.141	a. 100 % b. 1 Tahun	Rp 410.000.000		Rp 588.000.000		Rp 647.000.000		Rp 712.000.000		Rp 783.500.000		Rp 861.950.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		NA	NA		NA	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan			Bagian Umum Setda Kab	

			Konsultasi SKPD		Konsultasi SKPD																upaten Sidoarjo	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD		Jenis BMD yang diadakan	Jenis BMD yang diadakan	14 Jenis	14 Jenis	Rp 4.063.686.202	10 Jenis	Rp 398.610.276	14 Jenis	Rp 5.462.000.000	14 Jenis	Rp 2.509.000.000	14 Jenis	Rp 1.560.000.000	14 Jenis	Rp 616.000.000	14 Jenis	Rp 1.677.600.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya mobil jabatan		Jumlah mobil jabatan yang diadakan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	34 UNIT	NA	Rp -		Rp -	34 UNIT	Rp 4.000.000.000								Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas		NA	NA		NA											Bagian Umum Setda		

			atau Kendaraa n Dinas Jabatan			atau Kendara an Dinas Jabatan yang Disediak an															Kab upat en Sido arjo		
		Pengadaa n Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan	Tesedianya kendaraan dinas/ operasional			Jumlah kendaraan dinas/oper asional yang diadakan	Jumla h kendar aan dinas/ operas ional yang diadak an	1 UNI T	NA	Rp 3.250 .000. 000	1 UNI T	Rp 398.6 10.27 6			4 UNI T	Rp 2.000 .000. 000					Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo		
			Tersedian ya Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan			Jumlah Unit Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Disediak an		NA	NA		NA				1 Unit						Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo		
		Pengadaa n Mebel	Tersededia nya mebeler			Jenis meubeleur yang diadakan	Jenis meube leur yang	1 TAH UN	NA	Rp -		Rp -	1 TAH UN	Rp 1.000 .000. 000			1 TAH UN	Rp 1.000 .000. 000			1 TAH UN	Rp 1.000 .000. 000	Bagi an Umu m

					diadak an																	Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Tersedian ya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediak an		NA	NA		NA												Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedian a peralatan dan perlengkap an gedung/kantor /rumah dinas/jabat a		Jenis peralatan dan perlengka pan gedung/kantor / rumah dinas/jaba tan yang diadakan	Jenis peralat an dan perlen gkapa n gedun g/kantor / rumah dinas/ja abatan yang diadak an	30 Unit	30 Unit	Rp 813.6 86.20 2		Rp -		Rp 462.0 00.00 0	30 Unit	Rp 509.0 00.00 0	30 Unit	Rp 560.0 00.00 0	30 Unit	Rp 616.0 00.00 0	30 Unit	Rp 677.6 00.00 0	Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	

			Tersedian ya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralata n dan Mesin Lainnya yang Disediak an		NA	NA		NA		127 Unit										Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Pengadaa n Aset Tetap Lainnya	Tesedianya aset tetap lainnya		Jenis aset tetap lainnya yang diadakan	Jenis aset tetap lainny a yang diadak an	10 Bua h	NA	Rp -	10 Bua h	Rp -											Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Tersedian ya Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediak an																	Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi ya jasa penunjang perkantoran		Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	Perse ntase terpenuhinya jasa penunjang perkan toran	100 %	100 %	Rp 5.508 .850. 950	100 %	Rp 6.173 .453. 200	100 %	Rp 8.030 .000. 000	100 %	Rp 8.834 .000. 000	100 %	Rp 9.718 .500. 000	100 %	Rp 10.69 2.000 .000	100 %	Rp 11.76 1.600 .000	Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
	Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Terfasilitasi nya surat keluar masuk		Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Jumla h surat keluar masuk yang dikelol a	200 00 sura t	200 00 sura t	Rp 9.707 .750	300 00 sura t	Rp 13.00 0.000		Rp 10.00 0.000		Rp 11.00 0.000		Rp 12.50 0.000		Rp 14.00 0.000		Rp 15.50 0.000	Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Terlaksan anya Penyediaa n Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat		NA	NA		NA	4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran			Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	

		Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarny a Rekening listrik, air, telepon dan internet		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Rekeni ng listrik, air, telepo n dan interne t yang terbay ar	12 Bula n	12 Bula n	Rp 1.778 .500. 000	12 Bula n	Rp 1.949 .000. 000		Rp 2.243 .000. 000		Rp 2.468 .000. 000		Rp 2.715 .000. 000		Rp 2.987 .000. 000		Rp 3.285 .800. 000	Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Tersedian ya Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an		NA	NA		NA	12 Lap oran		12 Lap oran		12 Lap oran		12 Lap oran		12 Lap oran			Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Peralatan dan perlengkap an kantor yang berfungsi baik		Persentas e peralatan dan perlengka pan kantor yang berfungsi baik	peralat an dan perlen gkapa n kantor yang berfun gsi baik /	100 %	100 %	Rp 172.0 00.00 0	100 %	Rp 176.0 00.00 0		Rp 1.118 .000. 000		Rp 1.230 .000. 000		Rp 1.353 .000. 000		Rp 1.489 .000. 000		Rp 1.638 .000. 000	Bagi an Umu m Setd a Kab upat en	

						Seluruh peralatan kantor x 100 %															Sidoarjo					
			Tersedian ya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		NA	NA		NA		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedian ya tenaga kebersihan kantor		Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	19 Orang	19 Orang		Rp 3.548.643.200		19 Orang		Rp 4.035.453.200		Rp 4.659.000.000		Rp 5.125.000.000		Rp 5.638.000.000		Rp 6.202.000.000		Rp 6.822.300.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Tersedian ya tenaga keamanan kantor		Jumlah tenaga keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	8 Orang	8 Orang				8 Orang										Bagian Umum				

					yang terbayar	nan kantor yang terbay ar																Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Terbayarny a pengelola keuangan		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	Jumla h pengel ola keuan gan dan barang yang terbay ar	67 Ora ng	67 Ora ng		67 Ora ng												Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Terbayarny a tenaga Non ASN		Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	Jumla h tenaga non ASN yang terbay ar	12 Ora ng	12 Ora ng		12 Ora ng												Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Tersedian ya Jasa Pelayanan		Jumlah Laporan Penyedia an Jasa		NA	NA		NA		12 Lap oran		12 Lap oran		12 Lap oran		12 Lap oran		12 Lap oran		Bagi an Umu m	

		Umum Kantor		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																	Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	10 jenis	10 jenis	Rp 2.403.593.000	10 jenis	Rp 2.328.268.492	10 jenis	Rp 19.948.500.000	10 jenis	Rp 21.943.700.000	10 jenis	Rp 24.138.600.000	10 jenis	Rp 26.553.000.000	100 Unit	Rp 30.538.670.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Terpeliharanya kendaraan jabatan		Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	16 Unit	16 Unit	Rp 180.000.000	16 Unit	Rp 150.000.000		Rp 279.000.000		Rp 307.000.000		Rp 338.000.000		Rp 372.000.000		Rp 409.300.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	

		atau Kendaraa n Dinas Jabatan																				
		Tersedian ya Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihar a dan dibayark an Pajaknya		NA	NA		NA	20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit			Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak dan Perizinan Kendaraa	Terpelihara nya kendaraan dinas/ operasional	Jenis kendaraan dinas/oper asional yang dipelihara	Jenis kendar aan dinas/ operas ional yang dipelih ara	17 Unit	17 Unit	Rp 173.0 00.00 0	17 Unit	Rp 173.0 00.00 0		Rp 210.5 00.00 0		Rp 231.6 00.00 0		Rp 254.8 00.00 0		Rp 280.3 00.00 0		1.638 .000. 000	Bagi an Umu m Setd a Kab upat en	

		n Dinas Operasion al atau Lapangan																				Sido arjo	
			Tersediany a bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan		Jenis bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	Jenis bahan peralat an dan bahan pembe rsih kendar aan yang tersedi a	200 Bua h	200 Bua h		200 Bua h												Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Lunasnya STNK Kendaraan dinas		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Jumla h STNK kendar aan dinas yang lunas pajakn ya	17 Unit	17 Unit		17 Unit												Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	

			Tersedian ya Jasa Pemeliha aan, Biaya Pemeliha aan, Pajak dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan		Jumlah Kendara an Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang Dipelihar a dan dibayark an Pajak dan Perizinan nya		NA	NA		NA		42 Unit		42 Unit		42 Unit		42 Unit		42 Unit		42 Unit		42 Unit		Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Pemeliha aan Mebel	Terpelihara nya Mebel		Jenis mebeleur yang dipelihara	Jenis mebel eur yang dipelih ara	3 Jeni s	3 Jeni s		3 Jeni s		3 Jeni s		3 Jeni s		3 Jeni s		3 Jeni s		3 Jeni s		3 Jeni s		3 Jeni s		Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Terlaksan anya Pemeliha aan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihar a		NA	NA		NA		Rp 20.00 0.000		Rp 24.20 0.000		Rp 26.70 0.000		Rp 29.40 0.000		Rp 32.40 0.000		Rp 35.74 0.000		Rp 35.74 0.000		Bagi an Umu m Setd a Kab upat en	

																						Sidoarjo								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin			Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Jenis	15 Jenis		15 Jenis											Rp 774.155.000	Rp 490.785.000	Rp 1.681.000.000	Rp 1.849.100.000	Rp 2.034.100.000	Rp 2.237.600.000	Rp 2.461.460.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		NA	NA		NA		100 Unit		100 Unit		100 Unit		100 Unit		100 Unit							Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo		
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetap lainnya			Jenis aset tetap lainnya yang dipelihara	Jenis aset tetap lainnya yang dipelihara		NA		Rp -																	Rp 100.000	Bagian Umum Setda Kabupaten	

																					en Sido arjo					
			Terlaksan anya Pemelihar aan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihar a		NA	NA		NA										Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo					
		Pemelihar aan Aset Tak Berwujud	Terpelihara nya aset tak berwujud			Jenis aset tak berwujud yang dipelihara	Jenis aset tak berwuj ud yang dipelih ara	3 Jeni s	3 Jeni s		Rp 50.00 0.000	3 Jeni s		Rp 75.00 0.000		Rp 90.80 0.000		Rp 99.90 0.000		Rp 109.9 00.00 0		Rp 120.9 00.00 0		Rp 133.0 90.00 0	Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Terlaksan anya Pemelihar aan Aset Tak Berwujud			Jumlah Aset Tak Berwuju d yang Dipelihar a		NA	NA		NA		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		Bagi an Umu m Setd a Kab	

																						upat en Sido arjo	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung/kantor/rumah dinas/jabatan			Jumlah gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	4 Gedung	4 Gedung		Rp 1.239 .483. 492		Rp 8.831 .500. 000		Rp 9.714 .700. 000		Rp 10.68 6.200 .000		Rp 11.75 4.900 .000		Rp 12.93 0.490 .000	Bagi an Umu m Setda Kab upat en Sido arjo	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		NA	NA		NA		4 Gedung		4 Gedung		4 Gedung		4 Gedung			Bagi an Umu m Setda Kab upat en Sido arjo	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4 Gedung	4 Gedung	Rp 1.206.438.000	4 Gedung	Rp -	4 Gedung	Rp 8.831.500.000	4 Gedung	Rp 9.714.700.000	4 Gedung	Rp 10.686.200.000	4 Gedung	Rp 11.754.900.000	4 Gedung	Rp 12.930.490.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		NA	NA		NA											Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo		

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terciptanya ASN yang disiplin		Persentase ASN yang disiplin	ASN yang disiplin / Seluruh ASN x 100 %	100 %	100 %	Rp -	100 %		100 %									Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Terlatihnya ASN		Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat / Seluruh ASN x 100 %	-	-		-	Rp -	Rp 857.000.000	-	Rp 942.900.000	-	Rp 1.037.700.000	-	Rp 1.141.900.000	-	Rp 1.256.190.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya mesin absensi		Jumlah mesin absensi yang disediakan	Jumlah mesin absensi yang disediakan	2 Unit	2 Unit	Rp -	2 Unit	Rp -		Rp 37.000.000		Rp 40.700.000		Rp 44.900.000		Rp 49.500.000		Rp 54.550.000	Bagian Umum Setda Kabupaten	

																					Sidoarjo		
			Tersedian ya Unit Peningkat an Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningka tan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		NA	NA		NA	20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit		20 Unit		Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo		
	Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	tersedianya pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan		Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	Jumla h pakaia n dinas harian (PDH) yang diadak an	189 Bua h	189 Bua h		Rp -	189 Bua h		Rp -	Rp 133.1 00.00 0		Rp 146.5 00.00 0		Rp 161.2 00.00 0		Rp 177.4 00.00 0		Rp 195.2 40.00 0	Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Tersedian ya Pakaian Dinas beserta Atribut		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut		NA	NA		NA	2 Pak et		2 Pak et		2 Pak et		2 Pak et		2 Pak et		2 Pak et		Bagi an Umu m Setd a	

			Kelengkap an		Kelengka pan																Kab upat en Sido arjo		
		Pendataa n dan Pengolah an Administra si Kepegawa ian	Terfasilitasi nya administrasi kepegawai an		a. Jumlah administra si kepegawa ian yang disusun b. Jumlah administra si kepegawa ian yang diolah	a. Jumla h admini strasi kepeg awaia n yang disusu n b. Jumla h admini strasi kepeg awaia n yang diolah	a. 189 Ora ng b. 189 Ora ng	a. 189 Ora ng b. 189 Ora ng	Rp -	a. 189 Ora ng b. 189 Ora ng	Rp -	a. 189 Ora ng b. 189 Ora ng	Rp 3.900 .000	a. 189 Ora ng b. 189 Ora ng	Rp 4.300 .000	a. 189 Ora ng b. 189 Ora ng	Rp 4.800 .000	a. 189 Ora ng b. 189 Ora ng	Rp 5.300 .000	a. 189 Ora ng b. 189 Ora ng	Rp 5.930 .000	Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Terlaksan anya Pendataa n dan Pengolah an Administra si Kepegawa ian		Jumlah Dokume n Pendata an dan Pengolah an Administ rasi		NA	NA	NA												Bagi an Umu m Setd a Kab upat en		

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terfasilitasi nya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	50 Orang	50 Orang	Rp -		50 Orang	Rp -	50 Orang	Rp 165.800.000	50 Orang	Rp 182.400.000	50 Orang	Rp 200.700.000	50 Orang	Rp 220.800.000	50 Orang	Rp 242.980.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	NA			NA											Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo		
		Sosialisasi Peraturan Perundangan	Terfasilitasi nya ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan			Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan	50 Orang	50 Orang	Rp -		50 Orang	Rp -	50 Orang	Rp 60.500.000	50 Orang	Rp 66.600.000	50 Orang	Rp 73.300.000	50 Orang	Rp 80.700.000	50 Orang	Rp 88.870.000	Bagian Umum Setda Kab	

			perundang-undangan		g-undangan	peraturan perundang-undangan															upat en Sidoarjo	
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		NA	NA		NA											Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-	189 Orang	189 Orang	Rp -	189 Orang	Rp -		Rp 453.800.000		Rp 499.200.000		Rp 549.200.000		Rp 604.200.000		Rp 664.720.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	

						undangan																
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		NA	NA		NA	193 Orang		193 Orang		193 Orang		193 Orang		193 Orang		Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Teregistrasinya BMD SKPD	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	BMD SKPD yang telah teregistrasi / Seluruh BMD x100 %	100 %	100 %	Rp 504.930	100 %	Rp 418.000	100 %	Rp 2.700.000	100 %	Rp 3.000.000	100 %	Rp 3.300.000	100 %	Rp 3.700.000	100 %	Rp 6.360.000		Bagian Umum Setda Kabupaten	

																					Sidoarjo		
			Tersertifikasi BMD SKPD		Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	BMD SKPD yang telah tersertifikasi / Seluruh BMD x100 %	100 %	100 %	Rp 960.000	100 %	Rp 205.660.000	100 %	Rp 1.300.000	100 %	Rp 1.500.000	100 %	Rp 1.700.000	100 %	Rp 1.900.000	100 %		Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya laporan RKBMD		Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	Rp 504.930	1 Laporan	Rp 418.000		Rp 2.700.000		Rp 3.000.000		Rp 3.300.000		Rp 3.700.000		Rp 4.170.000	Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		NA	NA		NA	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			Bagian Umum Setda Kabupaten	

																					en Sido arjo	
		Pengama nan Barang Milik Daerah SKPD	Terinventari sasinya aset		Persentas e aset yang diinventari sasi	Aset yang diinve ntarisa si x 100%	NA	NA													Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Terlaksan anya Pengama nan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokume n Pengam anan Barang Milik Daerah SKPD		NA	NA	Rp -	100 %	Rp 205.0 00.00 0	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n					Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	
		Rekonsilia si dan Penyusun an Laporan Barang	Terlaksana nya rekon BMD SKPD		Jumlah rekonsilia si BMD SKPD yang dilakukan	Jumla h rekons iliasi BMD SKPD	4 Lap oran	4 lapo ran	Rp 960.0 00	4 Lap oran	Rp 660.0 00		Rp 1.300 .000	Rp 1.500 .000	Rp 1.700 .000	Rp 1.900 .000		Rp 2.190 .000			Bagi an Umu m Setd a	

		Milik Daerah pada SKPD			yang dilakukan																Kabupaten Sidoarjo	
		Tersusunnya laporan BMD SKPD		Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	4 Laporan	4 laporan		4 Laporan												Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		NA	NA		NA	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan			Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	

	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhi ya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi / Seluruh Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah x 100 %	90,25%	100%	Rp 11.644.904.938	100%	Rp 9.933.053.843	100%	12.122.383.936	100%	13.334.622.330	100%	14.668.084.563	100%	16.134.893.019	100%	Rp 17.748.382.321	Bagi an Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhi ya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dipenuhi	Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dipenuhi / Seluruh Kebutuhan Rumah Tangga	90,25%	100%	Rp 9.301.605.817	100%	Rp 8.286.853.843		10.043.000.000		11.047.300.000		12.152.030.000		13.367.233.000		Rp 14.703.956.300	Bagi an Umum Setda Kabupaten Sidoarjo	

						Kepala Daerah x 100 %																			
			Tersedian ya Kebutuha n Rumah Tangga Kepala Daerah			Jumlah Paket Kebutuha n Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disedi ak an		NA	NA		NA		4 Pak et		4 Pak et		4 Pak et		4 Pak et		4 Pak et		Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo		
		Penyediaa n Kebutuha n Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhi n ya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			Persentas e Kebutuha n Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	Kebutu han Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dipenu hi / Seluru h Kebutu han Wakil Rumah Tangga Kepala Daerah	90,2 5%	100 %	Rp 2.343. 299.1 21	100 %	Rp 1.646. 200.0 00		2.079. 383.9 36		2.287. 322.3 30		2.516. 054.5 63		2.767. 660.0 19		Rp 3.044 .426. 021		Bagi an Umu m Setd a Kab upat en Sido arjo	

						x 100 %																		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		NA	NA		NA		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		4 Paket		Bagian Umum Setda Kabupaten Sidoarjo		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12 Bulan	12 Bulan	Rp 2.926.823.298	12 Bulan	Rp 2.896.447.935	12 Bulan	Rp 3.358.700.000	12 Bulan	Rp 3.694.800.000	12 Bulan	Rp 4.064.400.000	12 Bulan	Rp 4.471.000.000	12 Bulan	Rp 4.918.500.000		Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten	

																					Sidoarjo					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan		Rp 173.066.143	12 Bulan		Rp 173.066.143		Rp 209.600.000		Rp 230.600.000		Rp 253.700.000		Rp 279.100.000		Rp 307.110.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan		NA	NA			NA		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan			Bagian Perencanaan dan Keuangan	

				Wakil Kepala Daerah																	an Setda Kabupaten Sidoarjo	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Kepala Daerah	24 Steel	24 Steel	Rp 220.000.000	24 Steel	Rp 220.000.000		Rp 266.200.000		Rp 292.900.000		Rp 322.200.000		Rp 354.500.000		Rp 390.050.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	
			Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan		NA	NA		NA	2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket		2 Paket			Bagian Perencanaan dan Keuangan	

			Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan																ang an Setd a Kab upat en Sido arjo		
		Pelaksana an Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi			Persentas e Pelaksana an Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	Perse ntase Pelaks anaan Medic al Check Up Kepala Daera h dan Wakil Kepala Daera h yang terfasil itasi	100 %	100 %	Rp 40.00 0.000	100 %	Rp 40.00 0.000		Rp 48.40 0.000		Rp 53.30 0.000		Rp 58.70 0.000		Rp 64.60 0.000		Rp 71.16 0.000	Bagi an Pere nca naa n dan Keu ang an Setd a Kab upat en Sido arjo	
			Terlaksana nya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala		NA	NA		NA	2 Ora ng		2 Ora ng		2 Ora ng		2 Ora ng		2 Ora ng			Bagi an Pere nca naa n dan	

			Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah																Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Rp 2.493.757.155	12 Bulan	Rp 2.463.381.792		Rp 2.834.500.000		Rp 3.118.000.000		Rp 3.429.800.000		Rp 3.772.800.000		Rp 4.150.180.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo	

			Tersediany a Dana Penunjang Operasiona l Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjan g Operasion al Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		NA	NA		NA		2 Ora ng/ Bul an		2 Ora ng/ Bul an		2 Ora ng/ Bul an		2 Ora ng/ Bul an		2 Ora ng/ Bul an		Bagi an Pere nca naa n dan Keu ang an Setd a Kab upat en Sido arjo	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokola n		Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	Terfasi litasiny a layana n admini strasi kegiat an dan keprot okolan	80,0 0	80,0 0	Rp 4.646 .028. 144	81	Rp 4.995 .319. 774	82	Rp 4.222 .571. 055	83	Rp 4.644 .828. 160	84	Rp 5.109 .310. 977	85	Rp 5.624 .242. 074	85	Rp 6.182 .266. 281		Bagi an Prot okol dan Kom unik asi Pim pina n Setd a Kab upat en	

																					Sidoarjo		
				Indeks Kualitas Kebijakan (Setwan, Diskominfo)	Hasil Survey kualitas kebijakan daerah di bidang Protokol dan Komunikasi Umum				70		72			75		77		80		80		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sidoarjo	
				Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP A (Setwan, Diskominfo)	DO: Persentase PD dengan Nilai SAKIP minim				0%		100%			100%		100%		100%		100%		Bagian Protokol dan Komunikasi	

					al A Formul a : (Jumla h OPD denga n Nilai SAKIP minim al A / Jumla h seluru h OPD) x 100% (Setwa n, Disko minfo)															Pim pina n Setd a Kab upat en Sido arjo		
				Persentase kinerja urusan tercapai (Setwan, Diskominfo)	DO: Perse ntase kinerja urusan tercap ai Formul a : (Jumla h urusan				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Bagi an Prot okol dan Kom unik asi Pim pina n Setd	

						dengan target kinerja tercapai / Jumlah urusan yang dilaksanakan Pemda) x 100% (Setwa n, Disko minfo)															a Kabupaten Sidoarjo		
		Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya pelayanan Keprotokolan		IKM Fasilitasi Keprotokolan	DO : Pelaksanaan SKM pada Bupati dan Wakil Bupati serta Penyelenggara kegiatan	80,00	80,00	Rp 2.896.364.514	81	Rp 2.999.023.774		Rp 3.691.788.062		Rp 4.060.966.868		Rp 4.467.063.555		Rp 4.917.769.910		Rp 5.405.146.901	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab	

						an yang dihadiri oleh Pimpinan Daerah															upat en Sidoarjo		
			Terlaksananya Fasilitas Keprotokol an		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan		NA	NA		NA		4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran		Bagi an Prot okol dan Kom unik asi Pim pina n Setd a Kab upat en Sido arjo	

		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya pelayanan Komunikasi Pimpinan			IKM Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	DO : Pelaksanaan SKM kepada Pejabat (Pusat, Provinsi, Daerah, Forkopimda Plus, DanSat TNI POLRI, Instansi Vertikal, Ormas dll)	NA	80,00	Rp 1.378.658.585	81	Rp 1.230.000.000		Rp 81.866.888		Rp 90.053.577		Rp 99.058.935		Rp 108.964.828		Rp 119.861.311	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sidoarjo	
--	--	--------------------------------	---	--	--	------------------------------------	--	----	-------	------------------	----	------------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	--

						nikasi Pimpin an																	
			Terlaksana nya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunika si Pimpinan		NA	NA		NA		4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran		Bagi an Prot okol dan Kom unik asi Pim pina n Setd a Kab upat en Sido arjo	

		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan			Persentase Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan	DO : Jumlah Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan / Seluruh Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati x 100%	NA	100 %	Rp 371.005.045	100 %	Rp 766.296.000		Rp 448.916.105		Rp 493.807.715		Rp 543.188.487		Rp 597.507.336		Rp 657.258.069	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sidoarjo	
--	--	---------------------------------	---	--	--	--	---	----	-------	----------------	-------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

			Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		NA	NA		NA		4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sidoarjo	
--	--	--	---	--	--	--	----	----	--	----	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Status Kinerja LPPD		T (2018 3,549)	T (4,00)	ST (4,21)	ST (4,3)	ST (4,4)	ST (4,45)	ST (4,5)	ST (4,5)
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		A- (4,27)	A- 4,3	A- 4,32	A- 4,35	A- 4,4	A- 4,45	A- 4,49	A- 4,49
3	Nilai SAKIP		BB (78,23)	A (80,1)	A (80,5)	A (81)	A (81,5)	A (85)	AA (90,01)	AA (90,01)
		1. Indeks Kualitas Kebijakan	NA	NA	70	72	75	77	80	80
		2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	20%	50%	75%	77%	78%	80%	100%	100%
		3. Persentase Kinerja Urusan tercapai	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	NA	66%	66%	66%	100%	100%	100%	100%
		5. Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP)	NA	NA	88	88,5	89	89,5	90	90
		1. Nilai SAKIP PD	80,04 (A)	82 (A)	84 (A)	84,5 (A)	84,7 (A)	85 (A)	85,5 (A)	85,5 (A)
		2. Nilai RB	NA	33,91 (93,42%)	34,48 (95%)	34,85 (96%)	35,21 (97%)	35,57 (98%)	36,3 (100%)	36,3 (100%)
		3. Nilai IPP	NA	B (3,88)	A- (4,01)	A- (4,10)	A- (4,20)	A- (4,30)	A (4,51)	A (4,51)
		4. Nilai IKM/SKM	NA	90 (Sangat Baik)	90,50 (Sangat Baik)	91 (Sangat Baik)	91,50 (Sangat Baik)	92 (Sangat Baik)	92,50 (Sangat Baik)	92,50 (Sangat Baik)

BAB VIII

PENUTUP

Dengan terselesaikannya penyusunan rancangan akhir perubahan Rancangan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ini, maka diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para aparatur sipil negara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu diharapkan para aparatur sipil negara, khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana yang telah tercantum pada dokumen ini.

Akhir kata rancangan akhir perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis. Renstra ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi.

Sidoarjo, Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP 19700926 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks. (031) 8941145
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
Dari : Asisten Administrasi Umum
Tanggal : 23 Mei 2023
Nomor : 005/5293/438.1.3.4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Bersama ini diharapkan kehadiran Saudara beserta pejabat/ staf yang menangani perencanaan pada masing-masing Bagian dalam acara yang akan dilaksanakan pada :

hari : Rabu
tanggal : 24 Mei 2023
waktu : 09.30 WIB
tempat : Ruang Rapat Delta Wicaksana (Ops Room)
acara : Pembahasan perubahan matriks Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah

Demikian untuk menjadikan perhatian.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



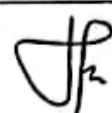

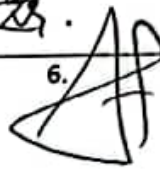



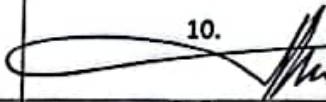

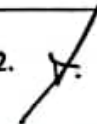

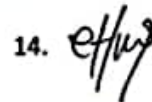



Ditandatangani secara elektronik oleh







Drs. ACHMAD ZAINI, M.M.
NIP. 196401311991031002

Drs. ACHMAD ZAINI, MM

Pembina Utama Madya
NIP 19640131 199103 1 002

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Mohammad Anur P. NIP. 19750422 1993 11 1001	Ass I	1.
2.	Nur Azizah NIP. 19680819 1992 03 2008	Perenc Kru	2. 
3.	Dwi Prasti A. NIP. 197812271997112001	— " —	3. 
4.	Ifer L NIP. 197104041993002003	Bag Keska	4. 
5.	Ely aidis. NIP. 19781211 1997112001	Bag. Kejasama.	5. 
6.	Chandra An F NIP. 19840517 2005 01 1002	Protokol	6. 
7.	Bastaryah Oktawana NIP. 19851016201102004	Bag Pembangunan	7. 
8.	Yoreta Glati NIP. 19931031 2016092007	Bag Pemerintahan	8. 
9.	SAKA FATMA. NIP. 19900328201811012.	Bag. Pim.	9. 
10.	Okri Alangyuh NIP.	Bag PB)	10. 
11.	SUPARNW NIP.	Bag PB)	11. 
12.	Oni permatasari NIP. 19901028 201402 2002	Bag. Umum	12. 
13.	Martono NIP. 199608162009021001	Bag. Organisasi	13. 
14.	Iva Dwi H NIP. 19960616 2019052008	Bag. Organisasi	14. 
15.	Hialis AFSOLIN NIP. 19860303 200512 2001	Bag. Kejasama	15. 

ACARA : Pembahasan perubahan matriks Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah
TANGGAL : 24 Mei 2023

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
16.	Lila Karina D. NIP. 199403082016092004	Bag. Pemerintahan	16. 
17.	Dery Anindhika NIP. 199410252020122020	Perenc. Kev	17. 
18.	Oni P. NIP.	UMUM	18. 
19.	Muliasari NIP.	K. Umum.	19. 
20.	Yuli S. NIP.	Perenc Kev	20. 
21.	Heru N. NIP.	— " —	21. 
22.	 NIP.		22.
23.	 NIP.		23.
24.	 NIP.		24.
25.	 NIP.		25.

DOKUMENTASI





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946, 8921960, 8921853 Faks. (031) 8941145
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 25 Mei 2023

Kepada

Nomor : 005/5479/438.1.3.4/2023

Yth. Sdr. *Sebagaimana Terlampir*

Sifat : Penting

di

Lampiran: 1 (satu) berkas

SIDOARJO

Hal : Undangan

Dalam rangka finalisasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 maka diharapkan kehadiran Saudara dan pejabat/pelaksana yang menangani Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dalam acara yang akan dilaksanakan pada :

hari : Senin

tanggal : 29 Mei 2023

waktu : 10.00 WIB - selesai

tempat : Papilio Hotel

Jl. Ahmad Yani No. 176-178, Surabaya

acara : Finalisasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Adapun untuk biaya *fullday meeting* ditanggung oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan untuk biaya perjalanan dinas ditanggung oleh masing-masing Bagian dan perwakilan Perangkat Daerah yang hadir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

a.n. **Pj. SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. ACHMAD ZAINI, M.M.
NIP. 196401311991031002

Drs. ACHMAD ZAINI, MM

Pembina Utama Madya
NIP 19640131 199103 1 002

Lampiran Surat

Nomor : 005/5479/438.1.3.4/2023

Tanggal : 25 Mei 2023

Daftar Tujuan Surat :

1. Pj. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Asisten Administrasi Umum
5. Inspektur Kab. Sidoarjo
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sidoarjo (Bidang Rendalev dan Mitra Sekretariat Daerah)
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Sidoarjo
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sidoarjo
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Sidoarjo
10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Sidoarjo
11. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Sidoarjo

**a.n. Pj. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. ACHMAD ZAINI, M.M.

NIP. 196401311991031002

Drs. ACHMAD ZAINI, MM






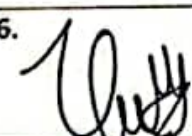



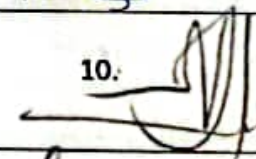

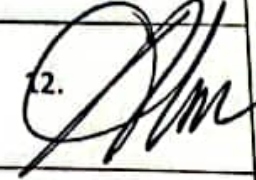



Pembina Utama Madya




NIP 19640131 199103 1 002

SUSUNAN ACARA FINALISASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA

SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021-2026

NO	PUKUL	KEGIATAN / ACARA	PEMBICARA	KETERANGAN
1	09.30 - 10.00	Persiapan keberangkatan dan Perjalanan ke Papilio Hotel		
2	10.00 - 10.30	Pembukaan		Ruang Pertemuan
3	10.30 - 12.00	Finalisasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra	Seluruh Peserta	Ruang Pertemuan
4	12.00 – 13.00	Ishoma dan Makan siang		
5	13.00 – 16.00	Finalisasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra	Seluruh Peserta	Ruang Pertemuan

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Mohammad Ainur Rahman, AP, M.S. NIP. 197504221973111001	Ass I	1. 
2.	Drs. Achmad Zaini, MM NIP. 196401311991031002	Ass III	2. 
3.	Irena Sradina, S.STP, M.S. NIP. 1970127 1980032002	Inspektoral	3. 
4.	Timur Karfika S NIP. 197510032006042016	Inspektoral	4. 
5.	Saffira Abt. Saliti NIP. 1981020 20002 2 004	Inspektoral	5. 
6.	DINDA ANDYARTA P. Y. NIP. 199612052020121004	Inspektoral	6. 
7.	Hernita NIP. 19870822006022001	Bappeda	7. 
8.	SUPARNO NIP. 197511291997031003	Bag. PBJ	8. 
9.	Bastariyah Oktaviana NIP. 19831062011012009	Bag. Pembangunan	9. 
10.	Vira Muri NIP. 198707112006022003	Bag. Penerangan	10. 
11.	Yanta Glori NIP. 199310312016042003	Bag. Pemerintahan	11. 
12.	Azz Mulyono NIP.	Bag. Organisasi	12. 
13.	MARYONO NIP. 197608162009021001	Bag. Organisasi	13. 
14.	DWI SANTORO NIP. 19871019200011006	Bag. PM	14. 
15.	JHENI AS NIP. 197706291996021001	Bappeda	15. 

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
16.	Nur Azizah	Bag. Perene. & Kev	16. 
	NIP. 19680814 1992 03 2 008		
17.	Dwi Prasti A	Bag. Perene & Kev	17. 
	NIP. 19780227 1997 11 2 001		
18.	Devy Anindhika R.	Perenc. & Kev	18. 
	NIP. 199910252020122020		







PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks. (031) 8941145
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

BERITA ACARA HASIL PERUBAHAN RENSTRA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023
Nomor : 050/5664/438.1.3.4/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Mei Tahun 2023, kami Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 188/8/438.1.3.4/2023, tanggal 05 Januari 2023 telah melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

1. Uraian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Keterangan
1	Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tetap
2	Indikator Tujuan 1. Status Kinerja LPPD 2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) 3. Nilai SAKIP Kabupaten	Indikator Tujuan 1. Status Kinerja LPPD 2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) 3. Nilai SAKIP Kabupaten	Tetap
3	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Tetap
4	Indikator Kinerja Sasaran 1 1. Indeks kualitas Kebijakan 2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A 3. Persentase Kinerja Urusan tercapai 4. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	Indikator Kinerja Sasaran 1 1. Indeks Kualitas Kebijakan 2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A 3. Persentase Kinerja Urusan tercapai 4. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-) 5. Nilai <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP)	Ada tambahan indikator
5	Sasaran 2 -	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Ada tambahan sasaran baru
	Indikator Kinerja Sasaran 2 -	Indikator Kinerja Sasaran 2 1. Nilai SAKIP PD 2. Nilai RB 3. Nilai IPP 4. Nilai IKM/SKM	

2. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Sekretariat Daerah

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional dan Formulasi
--------	--------------------------	------------------------------------

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Status Kinerja LPPD	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Merupakan hasil dari LPPD dua tahun sebelumnya dan EKPPD satu tahun sebelumnya
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Hasil Penilaian IPP oleh KemenpanRB
	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori penilaian SAKIP oleh KemenpanRB

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional
Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Indeks kualitas Kebijakan	Hasil penilaian masing-masing dimensi (perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan) x bobot / jumlah dimensi	Hasil penilaian kualitas kebijakan daerah yang sudah diimplementasikan minimal 1 tahun (terhitung sejak penilaian) Dinilai oleh Dewan Pertimbangan Internal Setda
	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP minimal A / Jumlah seluruh OPD x 100%	Persentase PD dengan Nilai SAKIP minimal A
	Persentase Kinerja Urusan tercapai	Jumlah urusan dengan target kinerja tercapai / Jumlah urusan yang dilaksanakan Pemda x 100%	Persentase kinerja urusan tercapai
	Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	Jumlah Semua PD dengan kategori Sangat Baik (A-) / Jumlah Semua PD x 100%	Persentase PD dengan nilai IPP kategori pelayanan Sangat Baik (A-)
	Nilai <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP)	Hasil penilaian Area Intervensi MCP Penilaian oleh KPK-RI	Hasil penilaian Area Intervensi MCP Penilaian oleh KPK-RI
Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Jumlah nilai SAKIP masing-masing komponen dan nilai SPIP x bobot / jumlah komponen nilai SAKIP dan nilai SPIP yang dinilai	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah berdasarkan hasil penilaian Tim SAKIP Kabupaten
	Nilai RB	Jumlah penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil	Hasil penilaian mandiri terhadap RB Sekretariat Daerah yang dilakukan oleh Tim RB Kabupaten
	Nilai IPP	Nilai masing-masing aspek evaluasi pelayanan publik x bobot / jumlah aspek evaluasi pelayanan publik	Hasil penilaian monev penyelenggaran pelayanan publik Sekretariat Daerah yang dilakukan oleh Tim IPP Kabupaten
	Nilai IKM/SKM	Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah yang di isikan pada link IKM	Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah yang di isikan pada link IKM

II. TARGET KINERJA

1. Target Indikator Kinerja Tujuan Sebelum Perubahan

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA PADA TAHUN						KONDISI AKHIR RENSTRA(2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Status Kinerja LPPD	NILAI	ST (3,549)	ST (4,00)	ST (4,21)	ST (4,3)	ST (4,4)	ST (4,45)	ST (4,5)	ST (4,5)
	2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	NILAI	A- (4,27)	A- 4,3	A- 4,32	A- 4,35	A- 4,4	A- 4,45	A- 4,49	A- 4,49
	3. Nilai SAKIP Kabupaten	NILAI	BB (78,23)	A (80,1)	A (80,5)	A (81)	A (81,5)	A (85)	AA (90,01)	AA (90,01)

2.Rincian Target Indikator Kinerja Tujuan Setelah Perubahan (jika ada perubahan target) tujuan Renstra PD

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA PADA TAHUN						KONDISI AKHIR RENSTRA(2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Status Kinerja LPPD	NILAI	T (2018 3,549)	NA	T (3,61)	ST (4,3) EPPD 2022 3,61	ST (4,4)	ST (4,45)	ST (4,5)	ST (4,5)
	2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	NILAI	A- (4,27)	A- 4,3 (2021 A- 4,30)	A- 4,32 (2022 A- 4,52)	A- 4,35	A- 4,4	A- 4,45	A- 4,49	A- 4,49
	3. Nilai SAKIP Kabupaten	NILAI	BB (78,23)	A (80,1) (2021 78,38)	A (80,5) (2022 78,96)	A (81)	A (81,5)	A (85)	AA (90,01)	AA (90,01)

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Perubahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	1. Indeks Kualitas Kebijakan	NA	70	72	75	77	80	80
	2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	NA	75%	77%	78%	80%	100%	100%
	3.Persentase Kinerja Urusan tercapai	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	66%	66%	100%	100%	100%	100%

--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Target Indikator Kinerja Sasaran Setelah Perubahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1. Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	1. Indeks Kualitas Kebijakan	45,20	70 (nilai 2022 75,02)	72	75	77	80	80
	2. Persentase PD dengan Nilai SAKIP A	33% (33% 16PD)	75% (46% 22PD)	77%	78%	80%	100%	100%
	3.Persentase Kinerja Urusan tercapai	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase IPP PD dengan kategori pelayanan Sangat Baik (A-)	66%	66%	66%	100%	100%	100%	100%
	5. Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP)	86	88	88,5	89	89,5	90	90
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	82 (A)	84 (A)	84,5 (A)	84,7 (A)	85 (A)	85,5 (A)	85,5 (A)
	Nilai RB	33,91 (93,42%)	34,48 (95%)	34,85 (96%)	35,21 (97%)	35,57 (98%)	36,3 (100%)	36,3 (100%)
	Nilai IPP	B (3,88)	A- (4,01)	A- (4,10)	A- (4,20)	A- (4,30)	A (4,51)	A (4,51)
	Nilai IKM/SKM	90 (Sangat Baik)	90,50 (Sangat Baik)	91 (Sangat Baik)	91,50 (Sangat Baik)	92 (Sangat Baik)	92,50 (Sangat Baik)	92,50 (Sangat Baik)

INDIKATOR DAN TARGET KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN

[illegible]

	Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)								
	Nilai IPP PD role model di bidang Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan (RSUD)	Nilai	A-	A-	A-	A-	A-	A-	A-
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang perekonomian	Nilai	NA	70	72	75	77	80	80
	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)	persentase	NA	75%	77%	78%	80%	100%	100%
	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM, DPMPTSP)	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Nilai IPP PD role model di bidang perekonomian (DPMPTSP)	Nilai	A-	A-	A-	A-	A-	A-	A-
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang SDA	Nilai	NA	70	72	75	77	80	80
	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	persentase	50%	75%	77%	78%	80%	100%	100%
	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Indeks Kualitas Kebijakan bidang pembangunan	Nilai	NA	70	72	75	77	80	80
	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)	persentase	NA	75%	77%	78%	80%	100%	100%
	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pembangunan (Dinas PUBMSDA, Dinas P2CKTR, Dishub, Bappeda, DLHK)	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Program Perangkat Daerah yang sesuai dengan standarisasi (SSH, ASB, HSPK)	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Permasalahan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Program Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	Persentase	81,25%	85 %	87,5%	90 %	92,5 %	95%	95%

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	Nilai	80	81	82	83	84	85	85

INDIKATOR DAN TARGET KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase penyuluhan hukum yang difasilitasi	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase doktasi informasi produk hukum daerah yang dipublikasikan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Kajian produk hukum daerah	jumlah	5	5	5	5	5	5	5
Administrasi Tata Pemerintahan	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang pemerintahan	Nilai	NA	70	72	75	77	80	80
	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Pemerintahan (Dispendukcapil, Bakesbang, Satpol PP, BPBD, Kecamatan)	persentase	50%	75%	77%	78%	80%	100%	100%
	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang pemerintahan	persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai IPP PD role model di bidang pemerintahan (Dispendukcapil)	Nilai	A-	A-	NA	NA	NA	NA	NA
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam naskah kerjasama daerah	persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kualitas kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan masyarakat	Nilai	NA	70	72	75	77	80	80
	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Rakyat dan masyarakat (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disporapar, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	Persentase	50%	75%	77%	78%	80%	100%	100%

[illegible]

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tingkat kepuasan Pimpinan Daerah terhadap layanan administrasi kegiatan dan keprotokolan	Nilai	80	81	82	83	84	85	85

INDIKATOR DAN TARGET SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN

[illegible]

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase rumusan Kebijakan Bina Mental Spritual dan ibadah yang ditindaklanjuti	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase kegiatan keagamaan Pemkab Kab Sidoarjo yang difasilitasi	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Rekomendasi pembangunan rumah ibadah yang difasilitasi	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase pembangunan Rumah Ibadah yang telah dilakukan money pelaksanaannya	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan Sosial (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas P3AKB, BPBD)	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Nilai IPP PD role model di bidang kesejahteraan sosial dengan kategori minimal A- (RSUD)	Nilai	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang Kesejahteraan masyarakat (Disporapar)	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga yang dimoney sesuai dengan implementasinya	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah rumusan kebijakan bidang BUMD & BLUD yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	Laporan	4	4	4	4	4	4	4
	Persentase kebijakan bidang BUMD & BLUD yang dilaksanakan	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah dokumen penatausahaan Bagian yang disusun	Laporan	40	40	40	40	40	40	40

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan operasi bersama KPPBC terhadap peredaran Barang Kena Cukai ilegal	Kali	2	2	2	2	2	2	2
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah rumusan kebijakan bidang Perekonomian yang disusun	Kebijakan	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian yang dilaksanakan	Laporan	4	4	4	4	4	4	4
	Persentase kebijakan bidang Perekonomian yang dilaksanakan	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang Perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang perekonomian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UM)	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah rumusan kebijakan Ketahanan Pangan bidang Pertanian dan Perikanan yang disusun	Kebijakan	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase kebijakan bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaksanakan	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan)	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase pemantauan dan evaluasi DBHCHT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindakan hukum	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase buruh pabrik rokok yang menerima BLT	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah rumusan kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang disusun	Kebijakan	1	1	1	1	1	1	1

Pertambangan dan Lingkungan Hidup									
	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase PD dengan Nilai SAKIP A di bidang SDA (Dinas LHK)	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase kinerja urusan tercapai di bidang SDA (Dinas LHK)	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah rumusan kebijakan bidang Energi dan Air yang disusun	Kebijakan	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Energi dan Air yang dilaksanakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase kebijakan bidang Energi dan Air yang dilaksanakan	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah kebijakan standarisasi penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang disusun (SSH, ASB, HSPK)	Kebijakan	3	3	3	3	3	3	3
	Persentase usulan standarisasi harga PD yang memenuhi kelengkapan sesuai SOP	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dikendalikan	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase paket pekerjaan dalam Program dan Kegiatan fisik PD yang telah dilaksanakan sesuai dengan target	Persentase	82,5%	85 %	87,5%	90%	92,5%	95%	95%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi dan administrasi pembangunan daerah yang disusun (LKPJ dan Laporan Berkala TW1 - TW4)	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5
	Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi >= 90% (diatas 90%)	Persentase	82,5%	85 %	87,5%	90%	92,5%	95%	95%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah produk hukum bidang pengadaan barang jasa yang dirumuskan	Kebijakan	2	4	2	2	2	2	2
	Presentase Paket Pengadaan yang diinventarisasi	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%

	Jumlah pelaksanaan riset dan analisa pasar barang/jasa yang dilaksanakan	Laporan	2	2	2	2	2	2	2
	Jumlah laporan dokumen pengadaan strategis	Laporan	10	10	10	10	10	10	10
	Prosentase Paket Tender yang dilaksanakan sesuai dengan pengajuan dari OPD	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Presentase produk yang diproses melalui Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan usulan dari OPD	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Presentase paket Tender yang dilakukan pendampingan perencanaan dan pengelolaan kontrak sesuai dengan permintaan dari OPD	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Prosentasi Paket Tender yang dilakukan Evaluasi	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase ketersediaan layanan LPSE secara online	Persentase	90%	91 %	92%	93%	94%	95%	95%
	Jumlah pengembangan sistem informasi	Fitur	2	2	2	2	2	2	2
	Prosentase pelayanan dan registrasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah para pelaku pengadaan barang/jasa atau personil lainnya yang dibina	Orang	300	600	400	300	300	300	300
	Jumlah Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ) yang dibina.	Orang	3	8	15	20	25	30	30
	Persentase pendampingan dan atau konsultasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase Kebijakan Daerah yang dievaluasi	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Presentase penggunaan e-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Jumlah kebijakan daerah bidang pengadaan barang jasa yang ditetapkan	Kebijakan	12	20	20	20	20	20	20
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang SOTK dan Tusinya telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase Unit Kerja yang Anjab dan ABK nya telah ditindaklanjuti hasil evaluasinya	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase PD yang nilai PMPRB berkatagori baik	Persentase	NA	30 %	35 %	40 %	45%	50%	50%

	Presentase PD yang nilai SAKIP berkategori Memuaskan (A)	Persentase	78,38	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5
	Persentase Unit Kerja yang menerapkan Budaya Kinerja	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase unit kerja yang IPPnya berkategori pelayanan prima	Persentase	NA	20 %	30	40	50	60	60P
	Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dalam Pelayanan Publik berkategori Zona Hijau	Persentase	NA	30 5 %	40%	40%	50%	60%	60%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase PD yang telah melaporkan kinerjanya sesuai dengan Juknis dan tepat waktu	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	Laporan	17	17	17	17	17	17	17

Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
	Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	Laporan	4	4	4	4	4	4	4
	Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan	Rekonsiliasi	4	4	4	4	4	4	4
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	Jenis	16	16	16	16	16	16	16
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	73	73	73	73	73	73	73
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	8	8	8	8	8	8	8
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis BBM yang disediakan	Jenis	3	3	3	3	3	3	3
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	2	2	2	2	2	2	2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Jenis	11	11	11	11	11	11	11
Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan/material yang tersedia	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis jamuan yang disediakan	Jenis	3	3	3	3	3	3	3
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	Unit	30	30	30	30	30	30	30
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Surat	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	Orang	67	67	67	67	67	67	67
	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	Orang	8	8	8	8	8	8	8
	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	Orang	19	19	19	19	19	19	19
	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	Orang	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	Unit	16	16	16	16	16	16	16
	Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas pajaknya	Unit	16	16	16	16	16	16	16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	17	17	17	17	17	17	17
	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Unit	17	17	17	17	17	17	17
Pemeliharaan Mebel	Persentase mebeleur yang dipelihara	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/ rehabilitasi	Jumlah	4	4	4	4	4	4	4
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Stel	24	24	24	24	24	24	24
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Dipenuh	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
Fasilitasi Keprotokolan	IKM fasilitasi keprotokolan	Nilai	80	81	82	83	84	85	85
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	IKM fasilitasi komunikasi pimpinan	Nilai	80	81	82	83	84	85	85
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang didokumentasikan dan dipublikasikan	Persentase	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%

INDIKATOR DAN TARGET SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	-	-	4	4	4	4	4
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	-	-	2	2	2	2	2
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	-	-	2	2	2	2	2
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	-	-	2	2	2	2	2
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	-	-	2	2	2	2	2
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	-	-	300	300	300	300	300
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	-	-	10	10	10	10	10
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	-	-	300	300	300	300	300
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	-	-	20	20	20	20	20
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	-	-	21	21	21	21	21
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	-	-	6	6	6	6	6
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	-	-	2	2	2	2	2
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	-	-	8	8	8	8	8

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	-	-	3	3	3	3	3
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	-	-	5	5	5	5	5
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	-	-	4	4	4	4	4
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	-	-	4	4	4	4	4
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	-	-	400	300	300	300	300
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	-	-	2	2	2	2	2
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	3	3	3	3	3
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	1	1	1	1	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	-	-	165	165	165	165	165
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	-	17	17	17	17	17
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	20	20	20	20	20
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	2	2	2	2	2
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	193	193	193	193	193

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	4	4	4	4	4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	15	15	15	15	15
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	4	4	4	4	4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	4	4	4	4	4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	1	1	1	1	1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	12	12	12	12	12
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	-	4	4	4	4	4
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	12	12	12	12	12
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	127	30	30	30	30
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	-	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	12	12	12	12	12

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	20	20	20	20	20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	-	42	42	42	42	42
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	10	10	10	10	10
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	-	-	100	100	100	100	100
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	-	-	1	1	1	1	1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	4	4	4	4	4
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	-	-	2	2	2	2	2
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	-	-	4	4	4	4	4
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	-	-	2	2	2	2	2
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	-	-	2	2	2	2	2
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	-	-	4	4	4	4	4

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	-	-	4	4	4	4	4
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	-	-	8	8	8	8	8
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	-	-	2	2	2	2	2
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	-	-	14	14	14	14	14
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	-	-	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	-	-	146	146	146	146	146
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	-	-	4	4	4	4	4
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	-	-	4	4	4	4	4

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP 19700926 199003 1 005

FORMULIR E. 73

CHECKLIST PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PENYUSUNAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
PERIODE TAHUN 2021- 2026

RPJMD Kabupaten/Kota	RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3	4	5	6	7
Visi "Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan" Misi : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas publik dan kemudahan berusaha; 2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan; 3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial dan modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan; 4. Membangun sumber daya manusia unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya; 5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai - nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.	Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas publik dan kemudahan berusaha;	√		-	-	-
Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	√		-	-	-

FORMULIR E. 73

CHECKLIST PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PENYUSUNAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
PERIODE TAHUN 2021- 2026

<p>serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara nya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital. 2. Terselenggara nya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha. 	<p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya kualitas kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah</p>					
<p>Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas dan kapabilitas ASN secara bertahap. Strategi 2. Penyusunan dan implementasi SOP secara konsekuen dan berkelanjutan. 3. Penguatan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) 4. Peningkatan jangkauan pelayanan publik terpadu (Mall Pelayanan Publik 5. Inovasi pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi digital. <p>Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan ekonomi, reformasi sosial, percepatan pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan rnerata; 2. Peningkatan pelayanan publik, pembangunan kota dan sistem transportasi yang mendukung berkembangnya porindustrian dan perdagangan; 	<p>Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 2. Meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan SPM, pemerintahan daerah dan pemerintahan umum 3. Mempercepat tersusunnya kebijakan administrasi kewilayahan daerah 4. Meningkatkan Fasilitasi Kerjasama daerah 5. Meningkatkan nilai-nilai spiritual masyarakat Sidoarjo 6. Penyusunan kebijakan daerah yang mendukung berkembangnya sektor strategis yaitu perdagangan, investasi, industri dan jasa 7. Kebijakan stimulus untuk mendorong berkembangnya koperasi dan usaha mikro 8. Penguatan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) 	<p>v</p>		-	-	-

FORMULIR E. 73

CHECKLIST PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PENYUSUNAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
PERIODE TAHUN 2021- 2026

<p>3. Penguatan konektivitas kawasan strategis sebagai pe.ndorong tumbuhnya pusat pertutnbuhan ekonomi baru vane berriampak pada pengentasan kemiskinan;</p> <p>4. Pengernbangan kerja sama lintas daerah, yang memposisikan Sidoarjo sebagai penyedia logistik regional dan nasional bertumpu pada kesiapan SDM yang unggul serta bet daya saing;</p> <p>5. Perwujudan visi Sidoarjo maju, sejahtera dan berkarakter berbasis pada kemandirian ekonomi, Peunggulan SDM dan berkelanjutan.</p>	<p>9. Optimalisasi implementasi kebijakan bidang administrasi dan pengendalian pembangunan</p> <p>10. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan bidang pelayanan publk</p> <p>Kebijakan :</p> <p>1. Penyusunan Kebijakan daerah yang implementatif dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan integrasi antar perangkat daerah</p> <p>3. penyusunan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah terkait pelaksanaan Kerjasama</p> <p>5. Mewujudkan kegiatan–kegiatan Mental Spiritual</p> <p>6. Optimalisasi penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi di bidang perdagangan, investasi, industri dan jasa</p> <p>7. Optimalisasi penyusunan kebijakan (policy brief), koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha mikro dan inklusi keuangan</p> <p>8. Mendorong OPD dalam mewujudkan digitalisasi pengadaan barang/jasa dengan menerbitkan aturan dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p>					
--	---	--	--	--	--	--

FORMULIR E. 73
CHECKLIST PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PENYUSUNAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
PERIODE TAHUN 2021- 2026

	9. Optimalisasi penyusunan kebijakan (policy brief), koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha mikro dan inklusi keuangan 10. Mewujudkan pelayanan publik yang prima					
Penetapan indikator kinerja daerah Indikator sasaran 1. Nilai SAKIP Kabupaten 2. Status Kinerja LPPD 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indikator Kinerja dan sasaran perangkat daerah Indikator tujuan 1. Nilai SAKIP Kabupaten 2. Status Kinerja LPPD 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	√		-	-	-
Indikator rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan 1. Program Prioritas 4 : 10.000 Beasiswa Kuliah	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif 1. Program Prioritas 4 : 10.000 Beasiswa Kuliah - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	√		-	-	-

Sidoarjo, Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP 19700926 199003 1 005

[illegible]

[illegible]

[illegible]

